

LAPORAN KINERJA 2021

**Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
Solok**

JALAN RAYA KOTOBARU
SOLOK 27361

Telp. 0755-21632 Email :

kppn.solok@kemenkeu.go.id Web :

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id>

Responsif
Akuntabel
Nyaman
Gepat
Akurat
Kompeten

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah, SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya dapat tersusun Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok Tahun 2021.


Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok tahun 2021 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja KPPN Solok. LAKIN Tahun 2021 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif menuju terwujudnya pencapaian kinerja yang profesional, modern, transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna serta memerlukan koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Akhirnya kami berharap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja KPPN Solok, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta bisa memberikan manfaat yang positif bagi KPPN Solok serta perkembangan organisasi DJPb secara keseluruhan.

Solok, 31 Desember 2021

Kepala Kantor



Budi Utomo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tahun 2021 telah ditetapkan dan ditandatangani Kontrak Kinerja yang di dalamnya memuat Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 10 SS dan 20 IKU yang merupakan target yang harus dicapai sepanjang tahun 2021.

Tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai pada tahun 2021 antara lain :

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel;
2. Pelayanan publik yang prima;
3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi;
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat;
6. Manajemen Satker yang berkesinambungan;
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
8. SDM yang kompetitif;
9. Organisasi yang kondusif;
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal;
11. Pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Dari tujuan dan sasaran tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam 19 IKU dimana hasil pencapaian IKU sebagian besar menggembirakan. Hal ini berarti bahwa pencapaian target secara rata-rata telah berjalan dengan baik yang ditunjang oleh sumber daya manusia berkualitas, peralatan yang memadai serta peraturan perundang-undangan yang ada.

KPPN Solok berusaha untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021 terutama untuk program yang targetnya belum tercapai pada tahun lalu. Untuk perencanaan kinerja pada masa yang akan datang dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul maka akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah pelatihan Sumber Daya Manusia yang tersedia untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia.
- b. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek untuk satker-satker dalam wilayah pembayaran KPPN Solok.
- c. Meningkatkan ketersediaan peralatan secara kuantitas dan kualitas.
- d. Mengupayakan mutasi internal secara terpola dan teratur untuk mengatasi kejenuhan dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis	3
D. Sistematika Laporan	4
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	38
C. Kinerja Lainnya	39
Bab IV Penutup	41
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2021	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
4. Matrik Cascading Tahun 2021	
5. Pagu dan Realisasi	
6. Kinerja Lainnya	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi yaitu setiap tahun setelah tahun anggaran berakhir.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok sebagai bagian unsur pelaksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan bukti pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok dan melibatkan secara aktif seluruh pegawai pada KPPN Solok.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dengan wilayah kerja Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

KPPN Solok mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran

melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dijabarkan dalam fungsi- fungsi sebagai berikut :

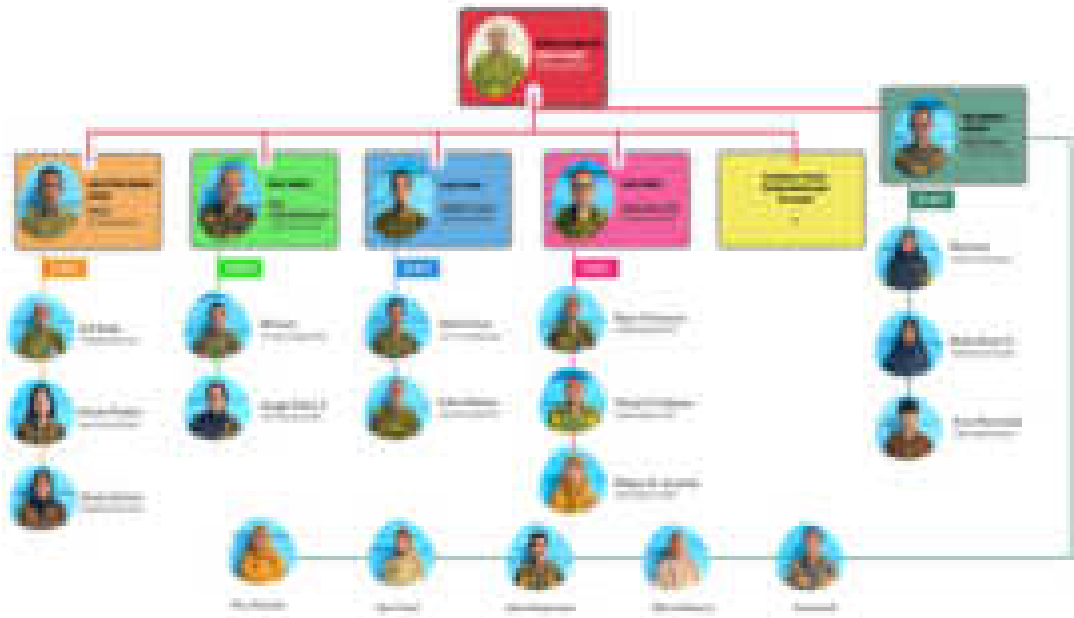
1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama
3. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
4. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
5. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
6. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
7. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
8. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
9. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
10. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
12. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
13. Pelaksanaan kehumasan; dan
14. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Secara Organisatoris, KPPN Solok adalah instansi pelayanan publik Tipe A1 atau setingkat Eselon III. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan lima orang pejabat Eselon IV yang terdiri dari :

- Kepala Subbagian Umum;
- Kepala Seksi Pencairan Dana
- Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
- Kepala Seksi Bank dan
- Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi

sebagaimana terlihat di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KPPN SOLOK



KPPN Solok didukung oleh 19 pegawai dan 6 orang PPNPN, adapun pegawai terdiri dari Kepala Kantor, 5 Kepala Seksi dan 13 Pelaksana. Dari total 19 Pegawai tersebut 8 orang berusia 50 s.d 59 tahun, 4 orang berusia 40 s.d 49 tahun, 1 orang berusia 30 s.d 39 tahun dan 6 orang berusia 20 s.d 29 tahun. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Berbagai upaya telah kami lakukan pada tahun 2021 untuk terus meningkatkan motivasi pegawai terhadap kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Peran Strategis

Sebagai kepanjangan tangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Solok menempati posisi yang cukup strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setidaknya karena dua alasan di bawah ini:

1. Merupakan satu-satunya wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi menerima, menyalurkan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah kerjanya;
2. Merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, dengan demikian baik tidaknya pelayanan yang diberikan akan berdampak langsung pada citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini , dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen KPPN Solok harus senantiasa berorientasi dan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku.

Selain itu berbagai perubahan yang terjadi pada sistem pelaksanaan anggaran dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal peraturan- peraturan perbendaharaan dan sistem yang berbasis teknologi informasi.

KPPN Solok dengan kekuatan SDM berjumlah pegawai 19 orang terus berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan SDMnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama teknologi informasi seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi DJPb.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Solok Tahun 2021 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan yang memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi
- Bab II : Perencanaan Kinerja yang memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
- Bab IV : Penutup yang memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategi KPPN Solok yaitu berbentuk peta strategi yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu *strategic stakeholders*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Perencanaan Strategis dapat diartikan sebagai perencanaan yang mengutamakan hasil (*result*) dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan-harapan konsumen, stakeholder dan pemegang kebijakan, yang terkait erat dengan fungsi utama organisasi yang dituangkan secara jelas dalam pernyataan visi organisasi. Diharapkan dengan penetapan perencanaan strategik dapat memberikan arah pada segenap komponen organisasi, kearah mana organisasi ini akan dibawa.

Sebagai organisasi yang merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan bendaharawan umum negara, KPPN Solok melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban APBN serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi : " Menjadi pengelola perbendaharaan Negara di daerah yang professional modern, transparan dan akuntabel"

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN mengemban Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;

3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai . Penetapan/ Perjanjian Kinerja terbagi menjadi Peta strategis dan Indikator Kinerja Utama. Peta strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel;
2. Birokrasi dan layanan public yang *agile*, efektif, dan efisien;
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel;
4. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan;
5. Pengelolaan kas yang optimal;
6. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien;
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
8. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi;
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif, akuntabel;
10. Sistem Informasi dan teknologi yang andal.

Indikator Kinerja Utama merupakan penjabaran dari Peta strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hal di atas, Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Nilai Kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN;
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN;
3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu;
4. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi;
5. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan;
6. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI;

7. Persentase akurasi perencanaan kas;
8. Indeks efektifitas pengelolaan pengeluaran kas;
9. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker;
12. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
13. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu;
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*;
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
16. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai;
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN;
18. Nilai kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB;
19. Tingkat kualitas pengelolaan BMN;
20. Implementasi penyelesaian implementasi rencana sistem manajemen keamanan informasi.

KBAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPN Solok yang menyajikan capaian Kinerja organisasi KPPN Solok pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel	Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	99,39	105,73
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64 (skala5)	4,84	104,31
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	100%	100,60
4	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	92,90	106,17
5	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%	76,59%	120
6	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100
7	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82%	100%	120
8	Pengelolaan kas yang optimal	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4	120
9	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	89	95,47	107,27

10	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	90	99,49	110,54
11	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89	100	112,36
12	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100,00%	101,94
13	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	99,62%	101,65
14	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84	84,18	100,21
15	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas	83	96,43	116,18
16	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	91,45	117,24
17	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	97,66%	102,26
18	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Nilai kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB	82	96	117,07%
19	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100	110	110
20	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80	100	120

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai capaian kinerja KPPN Solok pada tahun 2021 dari 10 SS dan 20 IKU, sebagai berikut:

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel

Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker K/L dalam pelaksanaan anggaran.

Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2021, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D KPPN tahun 2020. Target nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas pada tahun 2021 adalah 94. Sesuai dengan surat keputusan kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Hasil Penilaian dan Peringkat Laporan Keuangan Tingkat Kuasa

Bendahara Umum Negara (UAKPBUN) Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021 hasil penilaian sebesar 99,39. Artinya ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian sebesar 99,22. Tersaji table target dan realisasi IKU Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Tahun	Target	Realisasi
2021	94	99,39
2020	94	99,22
2019	94	99,37
2018	94	97,07

2. Birokrasi dan Pelayanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminsitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan.

Tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola keuangan negara di daerah.

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses pencairan dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.

Target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan pada tahun 2021 ditargetkan 4,64 (puas). Pada tahun 2021 KPPN Solok telah melakukan survey kepuasan satker terhadap layanan pada periode triwulan dengan jumlah responden sebanyak 24 satker/responden dengan hasil survei sebesar 4,84 dengan kategori puas. Sedangkan pada tahun 2020 dari target 4,55 terealisasi sebesar 4,80. Terdapat kenaikan target dan capaian pada tahun 2021. KPPN Solok terus berusaha meningkatkan pelayanan yang diberikan agar satuan kerja semakin puas dan nyaman dalam menggunakan layanan. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	4,64	4,84
2020	4,55	4,80
2019	4,53	4,73
2018	4,52	4,56

3. Perumusan Regulasi dan Otorisasi yang Optimal

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja di bawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

Pelayanan prima merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, khususnya terkait dengan pelayanan perbendaharaan.

Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi

janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diterima oleh Middle Office Seksi Pencairan Dana (total SP2D yang diterbitkan ditambah SPM yang ditolak secara substantif) sampai dengan penerbitan SP2D oleh Seksi Bank. Target penyelesaian SP2D secara tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 99.4% dengan realisasi sebesar 100%.

Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	99,4%	100%
2020	99,4%	99,49%
2019	99,4%	98,13%
2018	99%	99,87%

4. Komunikasi edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (*stakeholders*) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Pada tahun 2021 target Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi adalah 87,5 dan realisasi sebesar 92,90 dibandingkan tahun 2020, realisasi sebesar 92. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	87	92,90
2020	87	92
2019	-	-
2018	-	-

b. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan

Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda

Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan persentase jumlah PPK dan PPSPM (termasuk calon PPK dan PPSPM) yang mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi sampai dengan tahap selesai diverifikasi oleh KPPN sebagai Unit Pelaksana penilaian kompetensi dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Ruang lingkup pengukuran IKU ini di tahun 2021 adalah jumlah sisa pejabat perbendaharaan K/L yang belum melaksanakan penilaian kompetensi sampai dengan tahun 2020 (sebagaimana keterangan terlampir) serta para pejabat perbendaharaan yang baru ditetapkan pada tahun 2021. Dan untuk informasi, bahwa IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2021. Angka capaian pada tahun 2021 sebesar 76,59% dari target sebesar 30%.

Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	30%	76,59%
2020	-	-

c. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen satker secara berkesinambungan. Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup

KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi *Customer service* maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan. Manajemen satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit.

Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2021 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Pilotng Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, sesuai dengan tahapan implementasi yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi *Customer Service* maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan. Manajemen satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2021, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut:

- I. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2021 secara tepat waktu dan;

II. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2021 secara nasional

IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%, Artinya implementasi Aplikasi SAKTI telah dapat diterapkan sepenuhnya oleh satker sesuai dengan target yang ditentukan. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	100	100
2020	100	100
2019	95%	95%
2018	90%	100%

5. Pengelolaan Kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

a. Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Target persentase akurasi perencanaan kas KPPN pada tahun 2021 adalah 82%. Realisasi persentase akurasi perencanaan kas KPPN pada tahun 2021 adalah 100%. IKU ini merupakan IKU baru tanpa data historis di tahun 2021. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	82	100
2020	80	94,10
2019	-	-
2018	-	-

b. Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank Penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening bank penerima atau rekening penerima tidak aktif. Kecepatan penyelesaian retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/ *stakeholders*.

Target IKU indeks efektivitas pengelolaan dan pengeluaran kas pada tahun 2021 adalah 3,15 dengan realisasi 4. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	3,15	4
2020	3	4
2019	-	-
2018	-	-

6. Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran

pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi

Setiap aspek memiliki beberapa variabel yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan satker K/L.

Jumlah dan rincian variabel untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

- I. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Frekuensi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA (HAL3) dan pagu minus;
- II. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D, Realisasi Anggaran, Penyelesaian Tagihan dan penyerapan anggaran;
- III. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM) melihat pengembalian SPM/kesalahan SPM, Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD);

IV. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak, Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ)

Pada Tahun 2021 target nilai total kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah dari target sebesar 89%, realisasi sebesar 95,36%. Sedangkan pada tahun 2020 target sebesar 88% realisasi sebesar 95,29%. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisa
2021	88%	95.36%
2020	88%	95,29%
2019	88	95,17
2018	80%	95,43

b. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

- a) Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
- b) Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).

- c) Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
- d) Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
- e) Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Target IKU Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa adalah sebesar 90%, realisasi tercapai sebesar 99,49% artinya pelaksanaan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa lingkup KPPN Solok secara garis besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	90%	99.49%
2020	80%	98,43%
2019	75	93,70
2018	70	95

c. Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2021 dengan target IKU Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker adalah sebesar 89, realisasi tercapai sebesar 100. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisa
2021	89	100
2020	-	-

7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah.

a. Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

- a) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)
- b) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja dan Kas di BP (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan I 2021 = Desember 2020 - Februari 2021

Triwulan II 2021 = Maret - Mei 2021

Triwulan III 2021 = Juni - Agustus 2021

Triwulan IV 2021 = September - November 2021

Pada tahun 2021 target IKU rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal adalah 98,1%, realisasi sebesar 100%, Pada tahun 2020 target 98% realisasi sebesar 100%.

Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	98,1%	100%
2020	98%	100%
2019	98,1%	100%
2018	98%	100%

b. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2021 merupakan rata-rata data bulan

Desember 2020, bulan Januari dan Februari tahun 2021. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2021 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2021 dstnya.

Pada tahun 2021 target IKU persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu adalah 98%, realisasi sebesar 99,62%. Tahun 2021 IKU ini mengalami penurunan capaian disebabkan Komputer Satker KPU Solok Selatan terkena virus *ransomware* yang mengakibatkan data keseluruhan hilang/ rusak yang berdampak keterlambatan penyampaian LPJ, untuk itu KPPN Solok menghimbau Satker untuk menyediakan *back up* data agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu pada KPPN Solok sebagai berikut :

Tabel : Target dan realisasi IKU Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	98%	99,62%
2020	98%	100%
2019	97,5	99,88%
2018	97%	87,02%

8. Organisasi dan SDM yang Optimal dan berkinerja tinggi

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewedahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat,

efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

a. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2021.
2. Nilai NKO Unit periode tahunan 2020.

Pada tahun 2021 target IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah 84. Untuk capaian sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Peringkat Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021 realisasi sebesar 84,18. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada KPPN Solok sebagai berikut:

Tabel : Target dan realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	84	84,18
2020	83	85,01

2019	83	83,74
2018	81	81,44

b. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal .

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaikan secara triwulanan kepada UKI-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan).

Pada tahun 2021 target IKU hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 83, realisasi sebesar 96,43.

Tersaji tabel target dan realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN Solok sebagai berikut:

Tabel : Target dan realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	83	96,43
2020	83	85,01
2019	75	95,32
2018	-	-

c. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Pada tahun 2021 target IKU ini adalah 78, realisasi sebesar 91,45, sedangkan pada tahun 2019 target IKU adalah 77, dengan realisasi sebesar 87,40. KPPN Solok berusaha untuk terus melakukan *update* kepada pegawai terkait perubahan kebijakan, perubahan aplikasi dan perkembangan teknologi melalui kegiatan GKM sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai pada KPPN Solok sebagai berikut:

Tabel : Target dan realisasi IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	78	91,45
2020	77	87,40
2019	77	87,87
2018	77	87,09

9. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pada tahun 2021 target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN adalah 95,5%, realisasi sebesar 97,74%, sedangkan untuk tahun 2020 realisasi sebesar 97,65%. Terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan semakin sesuainya rencana penarikan dana KPPN dengan realisasi sebagai salah satu komponen yang berpengaruh. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada KPPN Solok sebagai berikut:

Tabel : Target dan realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	95%	97,65%
2020	95,5%	97,74%
2019	95%	96,09%
2018	95%	95,11%

b. Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 177/PMK.05/2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan.

IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Target IKU Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB Tahun 2021 ditargetkan sebesar 81 dan realisasi sebesar 92. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB pada KPPN Solok sebagai berikut:

Tabel : Target dan realisasi IKU Nilai Kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	82%	92%
2020	81%	92%
2019	-	-
2018	-	-

c. Tingkat kualitas pengelolaan BMN

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni persentase kesesuaian pelaksanaan RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan), Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN, Persentase penyelesaian penertiban rumah negara, Indeks Kelengkapan Data Rumah Negara pada Profil Master Aset, Persentase Digitalisasi Pengelolaan BMN, Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kepatuhan Pengisian RUP.

Pada tahun 2021 target IKU tingkat kualitas pengelolaan BMN adalah 100% dengan realisasi KPPN Solok sebesar 110%. Sedangkan tahun 2020 dari target 92 tercapai realisasi sebesar 97,62%. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN pada KPPN Solok sebagai berikut:

Tabel : Target dan realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	92	110
2020	92	97,62
2019	92	97,90
2018	91	102,58

10. Sistem Informasi dan teknologi yang andal (IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (*resources*) keuangan menjadi hasil keluaran (*output*) *real time* data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.

IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi mengukur tingkat penerapan keamanan

informasi di lingkungan Kanwil DJPb dan KPPN dengan berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-1/PB/2021 tentang Kebijakan SMKI di lingkungan DJPb.

Pengukuran dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan checklist kegiatan Rencana SMKI di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN yang didukung dengan dokumentasi sebagai bukti dukung telah dilaksanakannya kegiatan keamanan informasi di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN. Summary Checklist Rencana SMKI

Pada tahun 2021 target IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah 80% dengan realisasi KPPN Solok sebesar 100%, IKU ini merupakan IKU Baru. Tersaji tabel target dan realisasi IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada KPPN Solok sebagai berikut:

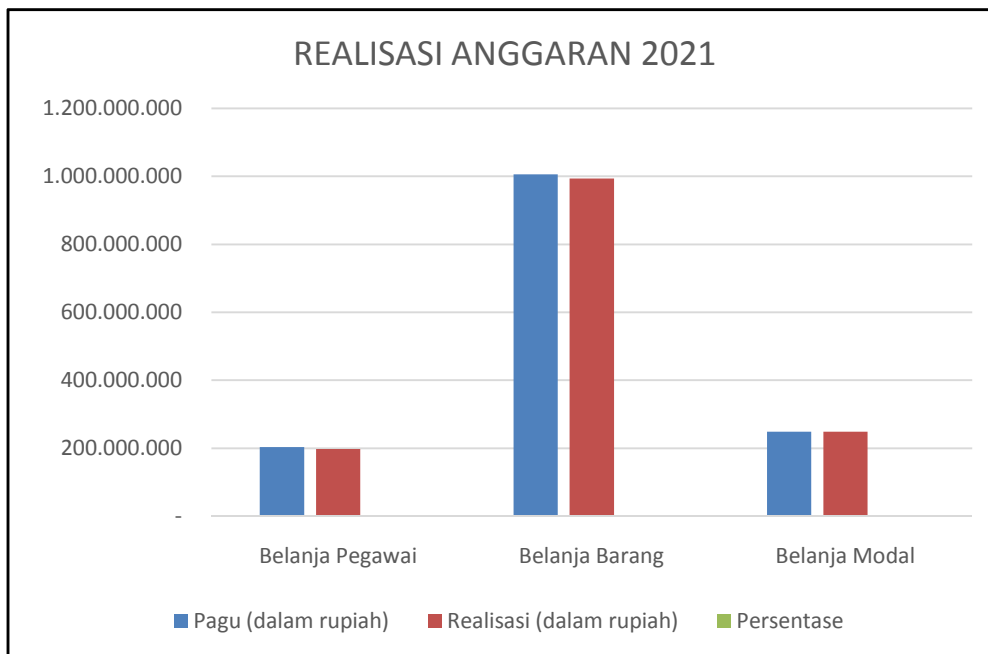
Tabel : Target dan realisasi IKU IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada KPPN Solok

Tahun	Target	Realisasi
2021	80%	100%
2020	-	-

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran KPPN Solok sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu (dalam	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	203.327.00	198.211.00	97.48%
Belanja Barang	1.005.524.00	994.006.569	98.86%
Belanja Modal	248.789.00	248.708.00	99.97%
Jumlah	1.457.640.00	1.440.985.56	98.86%



Pada tahun anggaran 2021 KPPN Solok mendapatkan alokasi dana DIPA sebagai sumber pembiayaan program/kegiatan setelah adanya revisi pemotongan anggaran menjadi Rp1.457.640.000,- terdiri dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp 203.327.000,-, belanja barang sebesar Rp 1.005.524.000,- dan belanja modal Rp 248.789.000,-.

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.440.985.569,- atau 98.86% masing-masing terdiri dari realisasi belanja

pegawai sebesar Rp 198.211.000,-, belanja barang sebesar Rp 994.006.569,- dan belanja modal sebesar Rp 248.708.000,-.

C. Kinerja Lainnya

Kinerja Lainnya KPPN Solok untuk tahun 2021, terdiri dari :

1. Telah terpenuhinya Standar Layanan Sistem Manajemen ISO 9001:2015 sesuai nomor sertifikat 01 100 1835127/023 tanggal 27 September 2021;
2. Telah dilaksanakannya Pemberian Penghargaan dan Apresiasi Pegawai kepada Pegawai dan PPNPN KPPN Solok dalam rangka Pemilihan *The Best Employee 2021*;
3. Narasi Profil KPPN Solok;
4. Pelaksanaan pendampingan pembayaran gaji induk bulan Januari 2022 Satuan Kerja Mitra KPPN Solok;
5. Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 dan penandatanganan Pakta Integritas paa Satuan Kerja Lingkup KPPN Solok;
6. *Success Story*:
 - a. Membangun kreatifitas nagari;
 - b. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari
 - c. Kopi dari nagari untuk negeri penyaluran dana desa.
7. Penyerahan Penghargaan Satuan Kerja berprestasi periode semester I 2021 lingkup KPPN Solok;
8. Implementasi aplikasi e-Jafung dan pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
9. Rapat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM);
10. Rapat tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) KPPN Solok;
11. *Sharing Session* pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) di lingkungan Pertanahan;
12. Bimbingan Teknis *Roll Out* SAKTI, *Overview* SAKTI dan pendaftaran pengguna SAKTI dan *One Time Password* (OTP) SAKTI;

13. Bimbingan Teknis Pelaporan data capaian output dan juknis reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021;
14. Pelaksanaan *Training Of Trainers* (TOT) SAKTI Kelompok Modul pembayaran tahun 2021 KPPN Solok;
15. Perbendaharaan menyapa KPPN Solok *Goes to School* (SMKN 1 Solok);
16. Bimbingan Teknis Sistem *Aplikasi Digital Payment Marketplace*.

1. Apa keunikan KPPN Solok yang tidak dimiliki kantor lain?

A. KEUNIKAN SOLOK DAN LETAK GEOGRAFIS :

KEUNIKAN SOLOK

Keunikan suatu daerah baik itu keunikan dalam adat istiadat, manusia serta budaya yang mempengaruhi tatanan hidup mereka sehari-hari rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mendengar atau membaca pendapat orang lain. Berikut ini, pengalaman dari Dirjen Kemendikbud Ristek RI tentang Nilai Budaya Minang yang Luar Biasa yang kami ambil dari surat kabar terbitan online Padang Expo pada tanggal 12 November 21.

” Dirjen Kemendikbud Ristek RI menilai bahwa Budaya Minang itu sangat luar biasa. Adat minangkabau memiliki nilai kekayaan budaya yang luar biasa, terutama dalam adat istiadat serta tradisinya yang masih berlaku dari zaman dahulu hingga sekarang. Pepatah orang tua dan masih melekat dalam jiwa orang minang yaitu “Adat bersendi syarak, dan Syarak bersendi Kitabullah” yang bermakna Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. *Aforisme* (suatu ungkapan mengenai doktrin atau prinsip atau suatu kebenaran yang sudah diterima umum) terkait pengamalan adat istiadat dan islam dalam masyarakat Minangkabau.

Budaya minang di Solok, khususnya Solok Selatan, di Nagari Saribu Rumah Gadang (SRG) ini, memiliki adat istiadat dan budaya minang ini sangat luar bisa. Dan ini harus tetap kita jaga dan dilestarikan oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah,

Ada ribuan Desa di seluruh Indonesia, tp perhatian ingin tahu tetap tertuju ke Solok Selatan, beberapa orang berpendapat lain, bahkan setingkat Kemendikbud memilih Desa di Solok Selatan untuk jadi salah satu fokus pembuatan film kebudayaan. Sampai mengirim Sutradara sekelas Riri Riza. Ini merupakan suatu berkah untuk Solok Selatan.

orang Minang itu kreatif, sehingga dalam budayanya, terutama Sandang dan Pangan juga ikut berubah. Bukti kreatif itu terlihat dari berbagai adaptasi aksesoris yg ditempelkan di pakaian adat kita”

Narasi Profil KPPN Solok

GEOGRAFIS

KPPN Solok beralamat di Jalan Raya Kotobaru KM 05 Kecamatan Kubung masuk dalam wilayah Kabupaten Solok. KPPN Solok lokasinya cukup strategis dan terletak di persimpangan jalan menuju Jakarta, Medan dan Padang.

Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahannya alam. Diantara danau-danau tersebut, yang terluas adalah danau singkarak, diikuti dengan Danau Kembar yaitu Danau Di atas dan Danau Dibawah, serta Danau Talang. Disamping itu, Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi yaitu Gunung Talang. Dilihat dari letaknya, Posisi Solok dinilai sangat strategis, karena dilewati jalur lintas Sumatera dan berbatasan dengan beberapa daerah yakni :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabuten Sijunjung dan Sawahlunto
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir
4. Sebelah barat dengan Kota Padang

Salah satu destinasi wisata lokal di Kabupaten Solok yaitu Danau Kembar atau yang lebih dikenal dengan Danau Diatas dan Danau Dibawah, seperti gambar di bawah ini :



Gambar : Danau Di atas dan Danau Dibawah

Kenapa danau ini disebut sebagai Danau Kembar? Dikarenakan yakni kedua danau tersebut mempunyai luas yang hampir sama (tetapi lebih luas Danau Diatas) dan juga letaknya pun sangat berdekatan. Meskipun bernama danau diatas dan juga danau di bawah namun pada kenyataannya letak kedua danau ini justru kebalikan dari namanya. Dan karena sebenarnya danau yang lebih tinggi justru malah diberi

Narasi Profil KPPN Solok

nama Danau Dibawah, dan begitu juga sebaliknya. Jarak kedua danau ini hanyalah 300 meter saja, sangat dekat.

B. SEJARAH

Sejarah panjang KPPN Solok dimulai dari tahun 1983, dimana KPPN Solok berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.01/1983 tanggal 3 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, serta awalnya terdiri atas 2 kantor yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN). Dengan adanya reorganisasi instansi vertikal DJA, dan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi pelayanan atas pelaksanaan APBN, KPN dan KKN digabung menjadi KPPN Solok.

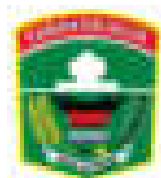
Berdasarkan SK Menteri Keuangan No 303/KMK.01/2004 nomenklatur KPPN berubah menjadi KPPN, dan KPPN Solok merupakan salah satu KPPN yang secara struktural berada dibawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Sumatera Barat, dengan Tipe A2. Kemudian, dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/KMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Solok berubah tipe dari KPPN Type A2 menjadi KPPN Tipe A1. Perubahan ini disertai dengan penambahan satu Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI).

C. WILAYAH KERJA KPPN SOLOK

KPPN Solok mempunyai 66 satker yang berada di 3 kabupaten/kota yaitu

1). Kabupaten Solok

Pada 2021 memiliki :



Satker K/L dengan besar dana 377,32 M
DAK FISIK dengan dana 100,79 M
Dana Desa dengan alokasi dana 81,25 M

2). Kabupaten Selatan

Solok Pada 2021 memiliki :



Satker K/L dengan besar dana 211,95 M
DAK FISIK dengan besar dana 74,96 M
Dana Desa dengan besar dana 47,69 M

Narasi Profil KPPN Solok

3). Kota Solok



Pada 2021 memiliki :

Satker K/L dengan besar dana 167,92 M

DAK FISIK dengan besar dana 45,85 M

Belanja K/L sebesar 747,87 M

Realisasi DAK FISIK sebesar 191,98 M terdiri dari :

1. Kabupaten Solok sebesar 84,88 atau mencapai 84,22%%
2. Kota Solok sebesar 37,78 M atau mencapai 82,4 %
3. Kabupaten Solok Selatan sebesar 69,32 M atau mencapai 92,47%

Sementara itu, untuk Dana Desa sebesar 128,94 M terdiri dari :

1. Kabupaten Solok sebesar 81,26M atau mencapai 100%
2. Kabupaten Solok Selatan sebesar 47,68M atau mencapai 100%

D. KOMPOSISI PEGAWAI :

Jumlah pegawai : 19 orang terdiri dari 13 orang pria dan 6 orang Wanita

Jumlah pegawai berdasarkan generasi :

- 1) Baby Boomers 10,52%
- 2) Gen X 42,10%
- 3) Gen Y 21,05%
- 4) Gen Z 26.31%

Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan sebanyak 19 pegawai:

No	Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	S2 Magister	1	0	1
2	S1 (Sarjana)	7	1	8
3	D III PKN STAN	0	3	3
4	D I PKN STAN	1	1	2
5	SMA	3	1	4
6	SD	1	0	1

Narasi Profil KPPN Solok

2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perbendaharaan di KPPN Solok serta bagaimana mengatasi tantangan tersebut?

Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker K/L dalam pelaksanaan anggaran.

a. Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, terdiri dari Variabel: Frekuensi Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3)
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Realisasi Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM), Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD)
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR), Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ)

Narasi Profil KPPN Solok

Telah dilaksanakan langkah-langkah untuk mendorong stakeholder meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L.

Masih diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja dan evaluasi triwulan berikutnya, antara lain :

- a) Penyampaian Nota Dinas Sekretaris Dirjen Perbendaharaan No.ND-5182/PB.1/ hal Pengelolaan Kinerja DJPb Periode Triwulan IV tahun 2021 kepada para pengelola Kinerja KPPN Solok.
- b) Mengadakan Dialog Kinerja Organisasi yang diadakan setiap bulan sebagai evaluasi penyerapan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana.
- c) Selanjut, mengadakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengundang K/L.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian IKPA satuan kerja secara berkala.
- e) Memberikan apresiasi kepada satuan kerja dengan capaian IKPA yang terbaik dengan reward berupa penganugerahan sebagai satuan kerja berprestasi dengan kartu bebas antrian.

Pada Tahun 2021 target nilai total kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah dari target sebesar 89%, realisasi sebesar 95,36%. Sedangkan pada tahun 2020 target sebesar 88%realisasi sebesar 95,29%.terdapat peningkatan capaian sebesar 0,07%.

Tahun	Target	Realisasi
2021	89%	95,36%
2020	88%	95,29%
2019	88%	95.17%
2018	80%	95.43%

b. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya.

Narasi Profil KPPN Solok

Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2019, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2018.

Target nilai LKPP Kuasa BUN KPPN yang berkualitas pada tahun 2021 adalah 94, sesuai dengan surat keputusan kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Hasil Penilaian dan Peringkat Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKPBUN) Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2021 hasil penilaian sebesar 99,39. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sebesar 99,22 Terdapat kenaikan capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,17%

Tahun	Target	Realisasi
2021	94	99,39
2020	94	99,22
2019	94	99.37
2018	93	97.07

c. Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN

Perencanaan kas KPPN adalah rencana penarikan dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD Harian, dan perkiraan pendapatan mingguan tingkat satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala

KPPN oleh KPA. Perencanaan kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana Satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Narasi Profil KPPN Solok

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker. PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari. Persentase pencairan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata-rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Target persentase akurasi perencanaan kas KPPN pada tahun 2021 adalah 82%.

Realisasi persentase akurasi perencanaan kas KPPN pada tahun 2021 adalah 100%, jika dibandingkan dengan tahun 2020, dengan target sebesar 80% dan realisasi sebesar 98,03%, berarti ada kenaikan sebesar 1,97%.

Tahun	Target	Realisasi
2021	82%	100%
2020	80%	98,03%

3. Apa saja capaian prestasi /produk inovasi unggulan serta manfaat dan dampaknya pada KPPN Solok?

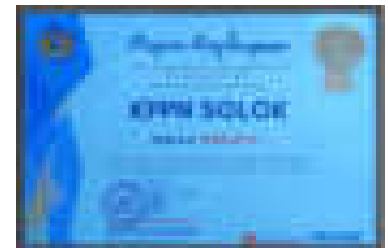
1) PERINGKAT I

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik
Selaku Kuasa BUN Tahun 2020 Kategori KPPN
Tipe A1



2) PERINGKAT I

KPPN A1 dengan Penilaian Kinerja Terbaik
Berdasarkan Hasil Pembinaan dan Supervisi
Semester II Tahun 2020



Narasi Profil KPPN Solok

3) PIAGAM PENGHARGAAN WBK

Pada 10 Desember 2019 KPPN Solok mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB



4) PERINGKAT I

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN) Daerah Tahun 2020 Kategori KPPN Tipe A1 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat



5) PIAGAM PENGHARGAAN

Pengelola Akun Youtube Resmi Terbaik KPPN di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Semester I & II Tahun 2020



6) PERINGKAT I

LK UAKPBUN Daerah Tahun 2020 Kategori KPPN Tipe A1 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat



7) PERINGKAT I

KPPN A1 dengan Penilaian Kinerja Terbaik Berdasarkan Hasil Pembinaan dan Supervisi Semester II Tahun 2019



8) SERTIFIKAT ISO

Pada 12 Oktober 2018 KPPN Solok meraih sertifikat SNI ISO 9001:2015



9) SATUAN KERJA TERBAIK

Penilaian IKPA Terbaik Berdasarkan Hasil Pembinaan dan Supervisi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Semester 1 Tahun 2021



10) PERINGKAT I

Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Terbaik Tahun 2019



4. Bagaimana kiat menciptakan kantor layanan yang baik dan telah dilakukan pada lingkup kerja saudara?

Mewujudkan Kantor Pelayanan Berpredikat WBK/WBBM

Kiat kita menciptakan kantor pelayanan terbaik adalah Melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi publik yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*, menjadikan aparatur sipil negara bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tatalaksana, 3) Penataan Manajemen SDM, 4) Penguatan Pengawasan, 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:

- Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
- Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
- Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
- Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
- Menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

Narasi Profil KPPN Solok

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan No.ND-40/PB.2021 tanggal 28 Januari 2021 KPPN Solok telah ditetapkan unit kerja di DJPb yang mengikuti penilaian unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat nasional tahun 2021, dan KPPN Solok dipilih untuk diusulkan sebagai kantor dengan pelayanan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada awalnya, KPPN Solok telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Semua itu, diperoleh tidak dengan mudah, perlu perjuangan yang panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Semua itu dilalui melalui tahapan tersebut diatas, dengan susah payah, mencurahkan segenap daya upaya guna memperoleh predikat WBK.

Tahap selanjutnya, di tahun 2021 KPPN Solok kembali ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit kerja di DJPb yang mengikuti penilaian unit kerja berpredikat WBBM. KPPN Solok ingin mewujudkan sebuah kantor pelayanan berpredikat WBBM yang setingkat lebih tinggi daripada WBK, dengan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan No.ND-40/PB.2021.

KPPN Solok bersama-sama para pegawai, PPNPS, stakeholders, membangun komitmen antara bersama dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. KPPN Solok telah bekerja keras, bahu membahu, dari Pimpinan hingga PPNPS berupaya melengkapi segala sesuatu yang menjadi persyaratan WBBM. Namun, keberuntungan belum berpihak pada KPPN Solok. Kita harus mengulang kembali, kita belum diizinkan mendapat predikat WBBM di tahun 2021. Insya Allah, pada tahun 2022 predikat WBBM bisa kita raih.

Narasi Profil KPPN Solok

5. Apa saja capaian Produk Inovasi Unggulan serta manfaat dan dampak pada kantor Saudara

a. Papan Digital Informasi Layanan KPPN

Kondisi Sebelum

Informasi terkait layanan KPPN yang disediakan secara konvensional dalam bentuk baliho dan standing banner yang tentunya hal ini memakan space ruang layanan menjadi semakin terbatas serta mengurangi kenyamanan ruang layanan KPPN, terlebih ketika terdapat beberapa informasi terbaru yang terbit secara bersamaan sehingga semakin banyak standing banner yang dibuat.

Informasi yang dibuat dalam bentuk standing banner secara langsung juga berdampak pada berkurangnya efisiensi anggaran, karena setiap informasi layanan terbaru tentunya harus dipersiapkan anggaran untuk mencetak standing banner dengan penggunaan yang terbatas pada kerelevanan informasi saat itu.

Manfaat

- Keberadaan banner digital (Bareh Solok) memberikan kesan bentuk penyampaian informasi yang kekinian berbasis digital yang tentunya juga memberikan penampilan ruang layanan KPPN Solok yang lebih baik dan menarik perhatian mitra kerja pada ruang tunggu layanan.
- Ruang layanan KPPN Solok menjadi nyaman dan lebih luas karena tidak ada lagi banyak standing banner di ruang layanan, banyak space yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan sarana baru, seperti tempat bermain anak, ruang tunggu (kursi layanan) yang lebih baik dari sebelumnya serta tersedianya tempat charge handphone. Semua hal ini tentunya bermanfaat meningkatkan kenyamanan bagi mitra kerja KPPN Solok.

Kondisi Sesudah

Kini dengan adanya Banner Elektronik Harian KPPN Solok, Informasi yang bersifat publik tidak perlu lagi dicetak dalam bentuk standing banner, melainkan disuguhkan dalam tampilan Digital Banner yang memberikan kesan modern dan dinamis.

Dampak dari Banner Elektronik Harian KPPN Solok ini sangat terasa bagi para Stakeholders, ruang kosong yang tersedia setelah disingkirkannya standing banner lama kini dapat dimanfaatkan untuk dipajang dekorasi tanaman hijau yang dapat menyegarkan sirkulasi udara pada kantor. Kami percaya bahwa digitalisasi mampu menjadi katalisator perubahan untuk menjaga kelestarian ekosistem bumi yang berkesinambungan.

Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Beberapa Standing Banner



Menjadi
Banner
Elektronik



Penamaan Barih Solok diambil dari bahasa minang, barih yang berarti beras, dinamakan barih solok, karena solok terkenal akan produksi berasnya. Barih/beras sebagai kebutuhan pokok semua lapisan masyarakat, sehingga penamaaninovasi ini dapat diartikan sebagai lumbung informasi yang menjadi kebutuhan bagi para mitra kerja KPPN Solok akan setiap bentuk informasi layanan.

Narasi Profil KPPN Solok

b. PITUAH DATUK

KPPN Solok terletak di Kabupaten Solok dengan wilayah kerja Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2017, kawasan ini dinobatkan sebagai Kampung Adat Terpopuler di Indonesia karena objek wisata Kawasan Seribu Rumah Gadang di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat. Dengan dasar ini dirasa perlu bagi para pegawai KPPN Solok untuk melakukan inovasi Pituah Datuak agar para pegawai lebih mengenal budaya Minangkabau karena sangat berhubungan dengan mitra kerja dan lingkungan yang dilayani oleh KPPN Solok

Kondisi Sebelum

Banyak generasi muda yang mulai melupakan local wisdom di lingkungannya padahal Minangkabau terkenal dengan pepatah yang mengandung kearifan dalam menjalani kehidupan. Gap generation antara Milenial, Baby boomer tentang nilai kehidupan.

Kondisi Sesudah

Dengan diimplementasikan inovasi Pituah Datuak, generasi muda lebih mengenal nilai budaya Minangkabau secara khusus. Secara umum, Pituah Datuak mampu memberikan motivasi lebih kepada para pegawai KPPN Solok dalam melaksanakan pekerjaan, menjadi media untuk melestarikan kearifan budaya Minangkabau, serta memiliki dampak positif dalam hal pembentuk karakter para pegawai KPPN Solok. Dengan terbentuknya karakter pegawai yang penuh semangat, arif dan bijaksana tentunya kualitas pelayanan kepada satuan kerja mitra KPPN Solok akan semakin meningkat.

Evaluasi internal telah dilakukan oleh MSKI dengan melakukan survei wawancara pegawai terkait pengilhaman nilai-nilai budaya local dan pengaruhnya dalam pembentukan karakter pegawai KPPN Solok serta dialog dengan stakeholders.

Manfaat

Pituah Datuak berhasil membuat pegawai semakin termotivasi dalam bekerja, mengetahui, mengilhami nilai-nilai budaya lokal, membentuk karakter pegawai serta mampu menginspirasi satuan kerja lain untuk menjalankan program serupa (replikasi) demi melestarikan budaya Minangkabau

Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Pembacaan Pituah Datuk, bersamaan dengan Briefing Pagi pada hari Senin



Narasi Profil KPPN Solok

c. **GERAKAN ANTI GRATIFIKASI (GERTAK)**

Stakeholders KPPN Solok adalah ASN dari Satuan Kerja. Secara umum pengelola keuangan satuan kerja adalah pegawai yang sudah lama sehingga sudah sering berinteraksi dan menjadi akrab dengan petugas FO dan Satker. Gertak dimaksudkan untuk tetap menjaga profesionalitas dan integritas pegawai dan mitra kerja KPPN Solok.

Kondisi Sebelum

Semangat anti gratifikasi selama ini sudah digaungkan oleh KPPN Solok kepada pihak internal maupun pihak eksternal melalui berbagai media, seperti banner, kanal media sosial KPPN Solok, dan melalui Nota Dinas resmi.

Manfaat

- Memberikan makna positif dalam implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama Integritas
- Meningkatkan kepatuhan pegawai yang tercermin dari penilaian perilaku pegawai KPPN Solok yang bernilai sangat baik.
- Meningkatkan nilai indeks kepuasan layanan yang diterima oleh satuan kerja

Kondisi Sesudah

Penerapan inovasi GERTAK memberikan suasana baru dalam penulisan semangat anti gratifikasi kepada pegawai dan satuan kerja.

GERTAK digaungkan pada setiap acara/kesempatan yang ada. Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPPN Solok secara aktif dan masif untuk menanamkan nilai anti gratifikasi dan anti korupsi.

Dengan inovasi GERTAK, aura dan semangat anti gratifikasi yang sebelumnya sudah ada dapat ditingkatkan lagi dan dirasakan oleh seluruh pihak di dalam setiap kegiatan yang ada.

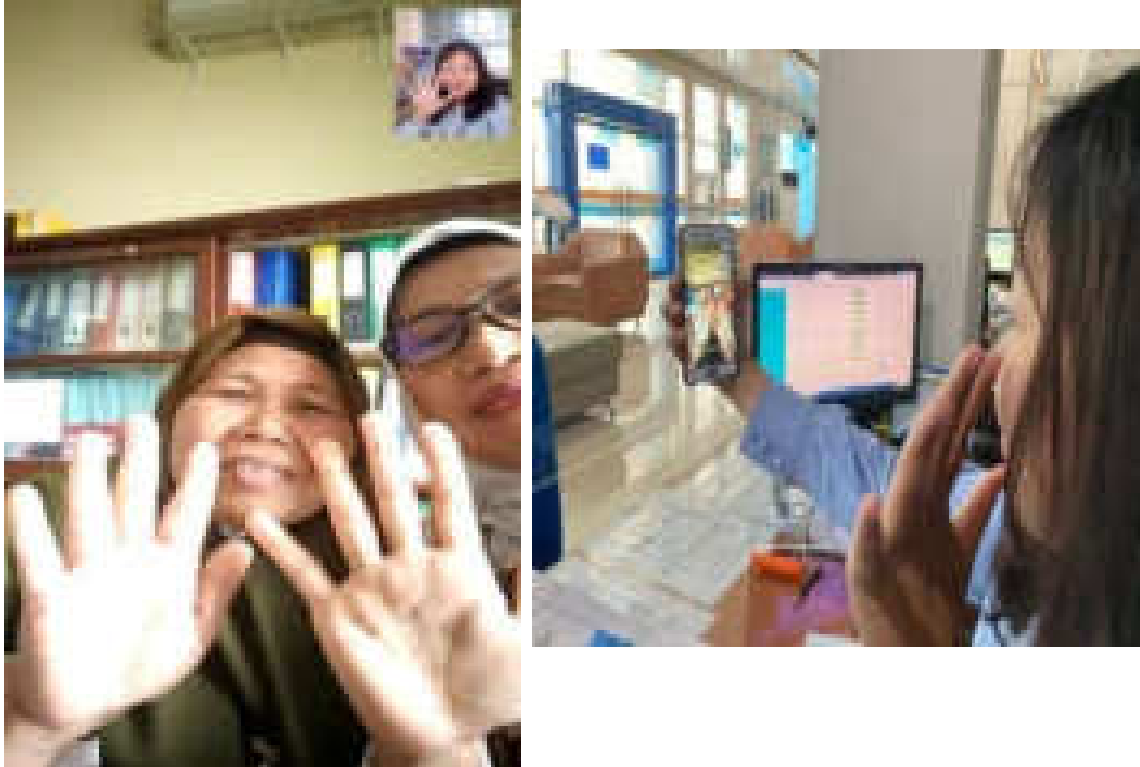
Telah ditunjuk "Miss GERTAK" sebagai agent yang menyebarkan semangat anti gratifikasi

BUKTI DOKUMENTASI

- Dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KPPN, dari nilai 96,56 % pada periode Semester II 2020 menjadi 96,62% di periode Semester I 2021, perbandingan periode ini berdasarkan inovasi Bareh Solok yang baru di implementasikan di awal tahun 2021.
- Dokumentasi inovasi terlampir

Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Foto tentang Gerakan Anti Gratifikasi yang ditunjuk petugas FO dan ditiru oleh satker yang memperagakan bahwa Gerakan Dalam Penuluran Semangat Anti Gratifikasi dan Korupsi



d. KEPO-in KITA (KENALI PEGAWAI ORGANISASI KITA)

Pada KPPN Solok, para pegawainya terdiri dari berbagai generasi, diantaranya adalah generasi babyboomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z yang memiliki kecenderungan dalam bersosialisasi yang berbeda. Generasi millennial punya kecenderungan lebih banyak berinteraksi melalui media sosial sehingga dibutuhkan monitoring aktivitas para pegawai di media sosial.

Kondisi Sebelum

Pimpinan hanya melihat pegawai di dunia nyata, belum mengikuti aktivitasnya di mediasosial.

Tidak ada permasalahan terkait aktivitas di media sosial para pegawai.

Kondisi Sesudah

Pimpinan sudah mengikuti juga aktifitas pegawai di media sosial diantaranya adalah melalui WA Group, Instagram, Youtube, Facebook.

Narasi Profil KPPN Solok

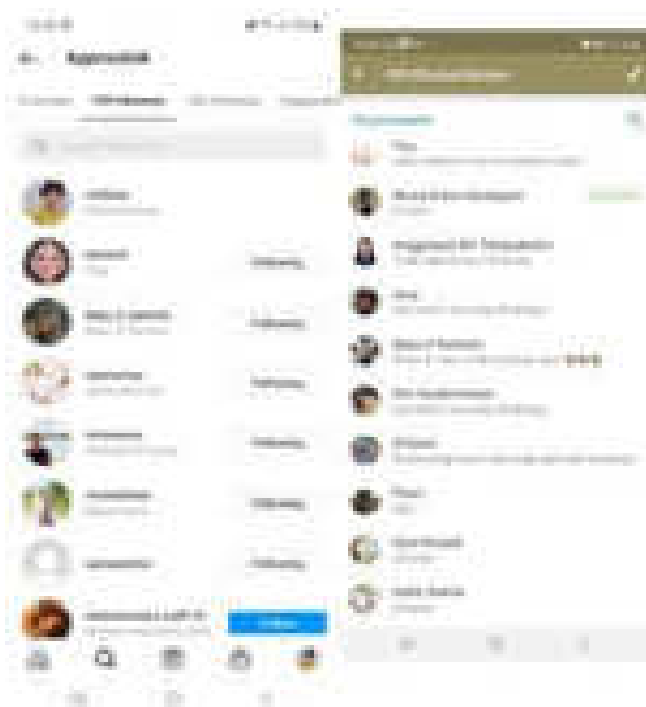
Manfaat

Pimpinan dapat memonitor aktifitas pegawai di dunia nyata dan di dunia maya. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari aktifitas pegawai di dunia nyata maupun di dunia maya.

Dokumentasi

- Foto-foto terkait kegiatan & Screenshot Medsos
- Laporan KI terkait pengaduan dll

Aktivitas Pegawai seperti kegiatan kunjungan ke rumah-rumah, kegiatan di media social, dll dan Pimpinan sudah mengikuti juga aktifitas pegawai di media sosial diantaranya adalah melalui WA Group, Instagram, Youtube, Facebook



e. SUDUIK KOMPENSASI

Stakeholders KPPN Solok berasal dari 2 Kabupaten dan 1 Kota dimana salah satunya stakeholders yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan berjarak cukup jauh dari KPPN Solok. Waktu tempuh yang cukup lama dari Solok Selatan membuat KPPN Solok berkomitmen untuk memberikan layanan secara cepat dan tepat, oleh karena itu KPPN Solok menyediakan Suduik Kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terdapat layanan yang tidak sesuai dengan maklumat layanan KPPN Solok.

Kondisi Sebelum

Stakeholder terkadang kurang puas apabila ada permasalahan dalam pelayanan atau terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan maklumat layanan, walaupun penyebabnya adalah karena sistem yang sedang bermasalah ataupun karena koneksi jaringan yang terganggu.

Bentuk pertanggungjawabkan serta permohonan maaf atas ketidaksesuaian layanan kepada satker hanya secara tertulis dalam bentuk surat pemberitahuan,

Kondisi Sesudah

Stakeholder merasa lebih meklum apabila terdapat permasalahan dalam proses pelayanan yang disebabkan oleh sistem ataupun koneksi jaringan.

Kompensasi disiapkan sebagai bentuk komitmen atas maklumat layanan.

Setelah diimplementasikan Suduik Kompensasi, pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian layanan tidak hanya dilakukan melalui surat-menyurat, namun juga diberikan kompensasi dalam bentuk cinderamata disertai permohonan maaf secara verbal

Manfaat

- Persepsi Stake holder semakin baik
- Stake holder lebih bijaksana pada saat melakukan pengisian survey
- Menunjukkan komitmen KPPN untuk memberikan layanan sesuai dengan maklumat layanan.

Dokumentasi

- Foto pemberian kompensasi Survey Kepuasan
- Survey Kepuasan

Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Surat pemberitahuan kondisi sedang maintenance dan Sduik Kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban jika terdapat layanan yang tidak sesuai dengan maklumat layanan KPPN Solok.



f. TKP KPPN SOLOK (TRANSPARANSI KINERJA PEGAWAI KPPN SOLOK)

KPPN telah menerapkan konsep Go-Green sehingga penyimpanan arsip kinerja bersifat paperless. Dengan inovasi ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas pada KPPN Solok

Selain itu, saat ini KPPN Solok sebagai bagian dari Kementerian Keuangan sedang menggalakkan semangat Flexible Working Space (FWS) sehingga penyimpanan data-data kinerja pegawai dilakukan secara digital untuk mendukung konsep kerja tersebut

Kondisi Sebelum

Sebelumnya, data kinerja KPPN Solok disimpan secara manual dengan membuat dosir kinerja tersendiri dan diberikan kepada pegawai dalam bentuk hardcopy serta softcopy, terkadang apabila dibutuhkan pegawai sering meminta kembali dikarenakan arsipnya disimpan di rumah dan pegawai kesulitan mencari softcopy yang diberikan karena banyak file di komputer.

Data kinerja di upload ke menu fitur dokumen kinerja melalui pbn open / aplikasi training, untuk masuk ke fitur dokumen dibutuhkan user name dan password, terkadang pegawai sering lupa password yang mengakibatkan dokumen kinerja diupload pada waktu jatuh tempo;

Kepuasan pegawai terhadap transparansi kinerja kurang di sebabkan pegawai kurang mengetahui alur kinerja.

Kondisi Sesudah

Dokumen kinerja langsung dapat dilihat dengan membuka link bit.ly/TKP_090 dan pegawai dapat menambahkan apabila ada yang belum di upload oleh Pengelola Kinerja ke TKP KPPN Solok.

Manfaat

Meningkatnya Kepuasan Pegawai dari Tahun sebelumnya sesuai survei kepuasan pegawai tahun sebelumnya pada Semester I Tahun 2020 96,49, pada Semester II Tahun 2020 96,39 dan pada Semester I Tahun 2021 99,19.

Memberikan kemudahan dalam mengakses data kinerja serta membantu pengelola kinerja dalam memonitoring kelengkapan dokumen kinerja para pegawai.

Dapat berfungsi sebagai early warning system bagi pegawai dalam rangka pencapaian target kinerja.

Dokumentasi

- Screenshot hasil survey kepuasan Internal
- Dosir Kinerja

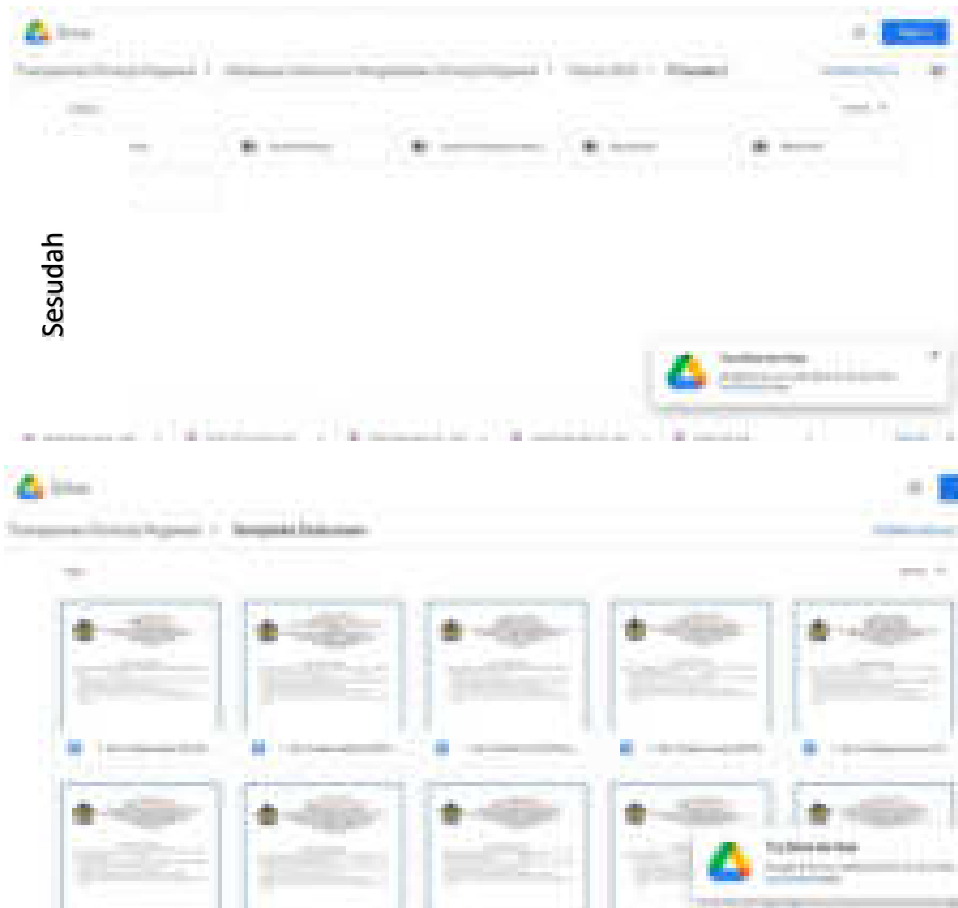
Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Sebelumnya Dosir Pegawai dan Kinerja diatur/disimpan dalam hardcopy, namun kini sudah dalam softcopy (disamping hardcopy)

Sebelum



Sesudah



g. GO PPNP (GREAT AND OUTSTANDING PPNP)

KPPN merupakan kantor yang memberikan pelayanan kepada stakeholder. Pelayanan tersebut akan optimal apabila didukung oleh supporting unit yaitu PPNP. PPNP juga memiliki tugas untuk memberikan dukungan pelayanan kepada pihak eksternal. Selain itu, PPNP juga merupakan salah satu supporting unit dalam memberikan layanan internal.

Kondisi Sebelum

- Penilaian kinerja PPNP pada TA 2020 KPPN Solok dilakukan melalui pemilihan PPNP terbaik berdasarkan voting yang dilakukan kepada seluruh ASN dilingkungan KPPN Solok. Voting ASN memilih PPNP yang dianggap berkinerja terbaik di antara PPNP yang ada. Pada pemilihan tersebut tidak disebutkan hal-hal apa saja yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan pilihan. Sehingga yang menjadi dasar pertimbangan penentuan pilihan oleh ASN dalam penentuan PPNP terbaik menjadi berbeda-beda.
- Perlu dibuat alat ukur kinerja pegawai
- PPNP untuk memudahkan dilakukan evaluasi atas kerjanya.

Kondisi Sesudah

Sudah dibuat sistem penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, mencakup kinerja dan perilaku PPNP. Alat ukur sudah dibuat yaitu bentuk sistem aplikasi penilaian kinerja PPNP KPPN Solok berbasis google form yang diberi nama "GO PPNP".

Penilaian dilakukan oleh ASN melalui googleform yang diberi nama "GO PPNP" yang berisi kriteria-kriteria tersebut di atas.

Hasil penilaian akan dikomunikasikan dengan PPNP agar ada feedback dan peningkatan kinerja maupun perilaku. Atas dasar hasil penilaian ini, untuk PPNP yang berprestasi diberi penghargaan.

Manfaat

Dengan adanya GO PPNP terdapat dasar penilaian yang jelas dan fair untuk menentukan PPNP terbaik serta ada peningkatan kualitas kinerja dan perilaku PPNP

Dokumentasi

- Hasil penilaian kinerja dan perilaku PPNP
- Foto rapat evaluasi Hasil penilaian kinerja dan perilaku PPNP

Narasi Profil KPPN Solok



Gambar : Suasana kegiatan rapat bersama PPNNP dan membahas penilaian dengan system penilaian yang jelas dan fair untuk menentukan PPNNP terbaik serta ada peningkatan kualitas kinerja dan perilaku PPNNP



Narasi Profil KPPN Solok

h. BACARITO LAMAK

Pada era saat ini terutama sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, Youtube merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Berdasarkan data yang diolah oleh media kompas.com, Youtube digunakan oleh 93,8 persen dari total keseluruhan pengguna internet Indonesia yang berumur 16 hingga 64 tahun. Dengan lokasi strategis KPPN Solok yang jauh dari jangkauan satuan kerja, Bacarito Lamak diharapkan dapat menjadi saluran informasi kepada satuan kerja terkait dengan memanfaatkan kanal Youtube yang tren di seluruh kalangan khususnya milenial. Bacarito lamak ini juga nantinya diharapkan dapat menjangkau tidak hanya satuan kerja KPPN Solok, namun hingga masyarakat luas. Bacarito Lamak sendiri merupakan bahasa Minangkabau yang berarti Mengobrol seru yang nantinya akan memberitahukan informasi dengan cara yang menarik.

Layanan satu atap pada KPPN Solok yang sempat berhenti diakibatkan pandemi COVID-19 juga akan kembali dilaksanakan melalui Bacarito Lamak sesuai dengan MoU bersama KPP Pratama Solok nomor PRJ- 001/WPB.03/KP.03/2021 dan PRJ-

001/WP.27KP.06/2021 tanggal 4 Maret 2021. Untuk episode-episode berikutnya, KPPN Solok akan berusaha memberikan informasi terkini dan menarik sehingga selain menjadi branding image juga dapat menambah wawasan penonton.

Kondisi Sebelum

Penyebaran informasi oleh KPPN Solok hanya terbatas pada Stakeholder melalui sosialisasi ataupun media sosial KPPN Solok seperti forum WhatsApp, Website, Instagram dan Facebook resmi KPPN Solok.

Kondisi Sesudah

Sebagai aksi dalam pengenalan keberadaan, tugas dan fungsi KPPN Solok, serta memberikan informasi yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, KPPN Solok berinovasi untuk mulai memperkenalkan diri melalui kanal Youtube. KPPN Solok menghadirkan tayangan podcast yang mengulik berbagai macam hal yang ditayangkan pada channel Youtube KPPN Solok.

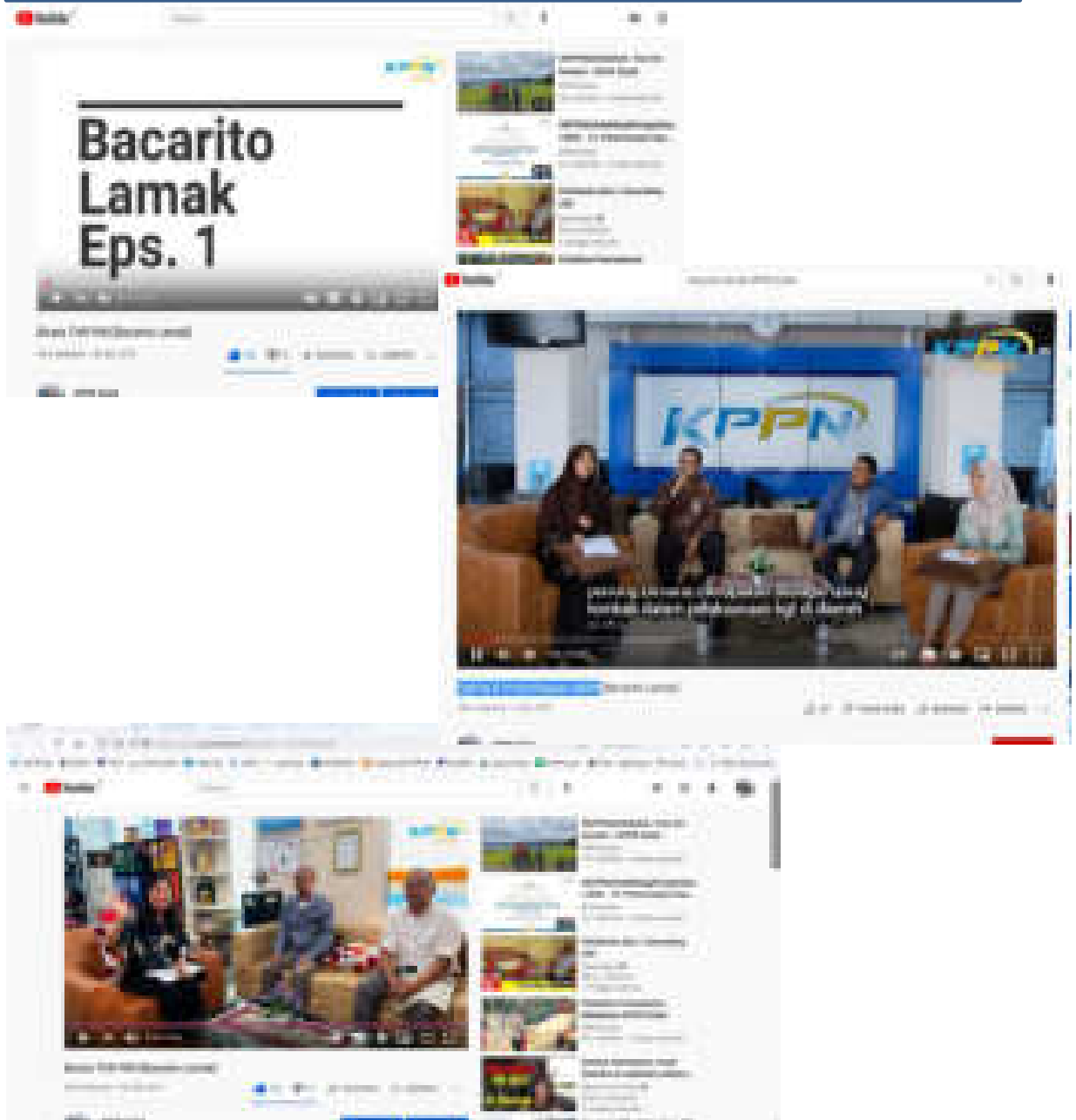
Dokumentasi

Penyebaran informasi oleh KPPN Solok dapat dilihat pada youtube di alamat sebagai berikut:

- Bacarito Lamak Sesion 1 bercerita tentang Mutasi yang di alami oleh pegawai KPPN :
<https://www.youtube.com/watch?v=RDp5uKJUmJw>
- Bacarito Lamak Sesion 2 bercerita tentang Pembayaran THR PNS :
<https://www.youtube.com/watch?v=nDYJ8K1QO8>
- Bacarito Lamak Sesion 3 bercerita tentang Digipay dan pemberdayaan UMKM:
<https://www.youtube.com/watch?v=GVKspbQULsQ>

Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Bacarito lamak session 1 bercerita tentang mutase pegawai KPPN Solok dan Bacarito lamak bercerita tentang pembayaran THR PNS di Youtube kanal KPPN Solok, serta bacarito lamak Sesion 3 tentang Digipay dan Pemberdayaan UMKM



i. **SARASO (Sistem Aplikasi Persuratan dan SKPP Onlie**

Salah satu pelayanan yang ada di KPPN Solok adalah pengesahan SKPP. Dalam pengajuan pengesahan SKPP beserta dengan dokumen pendukungnya seringkali ditemui ketidaksesuaian data ataupun ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dokumen tersebut harus dikembalikan yang mengakibatkan penyelesaian pengesahan SKPP menjadi lebih lama. Dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan satuan kerja, diperlukan inovasi untuk meminimalisir terjadinya pengembalian pengesahan SKPP yang diajukan oleh satuan kerja yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kondisi Sebelum

Sistem Persuratan pada kondisi sebelumnya dimana satuan kerja langsung datang ke KPPN untuk mengambil berkas-berkas seperti Arsip SPM, SKPP, dan berkas lainnya. Namun, ditengah kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan satuan kerja tidak bisa datang secara terus menerus ke KPPN. Hal ini mengakibatkan satuan kerja hanya dapat mengambil arsip SPM, SKPP dan surat lainnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi, satuan kerja tidak dapat memonitoring secara langsung apakah berkas-berkas yang akan diambil telah selesai diproses dan sudah siap untuk diambil atau dikirim kepada satuan kerja.

Satuan kerja membuat SKPP secara manual yang terkadang terjadi kesalahan dalam proses pembuatan SKPP seperti data yang tidak sesuai. Sehingga saat SKPP tersebut sudah dikirimkan ke KPPN, kesalahan data atau kesalahan lainnya baru dapat teridentifikasi setelah SKPP tersebut sampai di KPPN. Hal ini mengakibatkan satuan kerja mengulang Kembali pembuatan SKPP, mencetak ulang, serta mengirim ulang ke KPPN. Akibatnya pelaksanaannya tidak berjalan secara efisien.

Kondisi Sesudah

Saat ini KPPN Solok memiliki inovasi bernama SARASO yang penamaannya terinspirasi dari karakteristik kearifan lokal yang memiliki arti "satu rasa". Dengan adanya inovasi SARASO lebih memudahkan satuan kerja dalam memonitoring terkait persuratan dan pembuatan SKPP Online. SARASO memfasilitasi perekaman SKPP secara online sebelum satuan kerjan mengirim hardcopy SKPP ke KPPN. SKPP Online yang direkam oleh satuan kerja pada aplikasi SARASO, kemudian dimonitoring dan dilakukan pengecekan oleh KPPN sehingga apabila terjadi kesalahan secara langsung dapat diinformasikan kepada satuan kerja.

SARASO juga memiliki fitur Persuratan sehingga satuan kerja lebih memudahkan dalam memonitoring data persuratan. Pada aplikasi SARASO ditampilkan status persuratan sehingga memudahkan satuan kerja untuk mengetahui sejauh mana berkas tersebut diproses dan mengatur waktu untuk mengambil berkas tersebut ke KPPN. Sehubungan dengan inovasi SARASO, telah

Narasi Profil KPPN Solok

diajukan permohonan informasi SARASO untuk dilakukan replikasi oleh KPPN Pacitan.

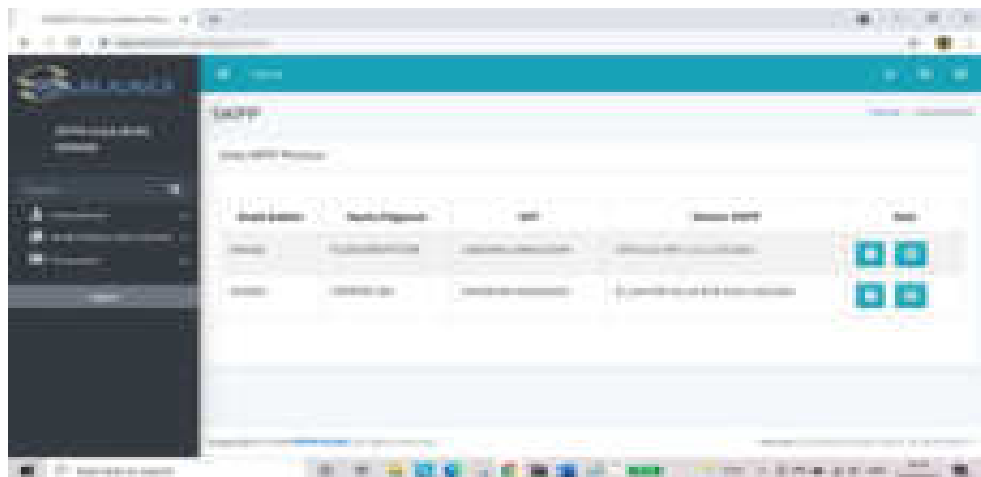
Manfaat

- Memfasilitasi kebutuhan satuan kerja dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi.
- Membantu satuan kerja agar dapat melakukan monitoring data persuratan yang berhubungan dengan KPPN, seperti arsip SPM, surat SKPP, Permohonan TUP, Permohonan Dispensasi dan persuratan lainnya.
- Otomatisasi perekaman SKPP, yang dalam hal ini divalidasi keabsahan dan kebenaran data yang dapat dilakukan sebelum SKPP dicetak
- Data SKPP yang divalidasi terlebih dahulu sehingga tidak perlu dilakukan cetak ketika ada perbaikan sejalan dengan konsep go green dan layanan jarak jauh yang kini semakin memudahkan satuan kerja, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19
- Berdasarkan data Indeks Kepuasan Layanan Semester I Tahun 2021, indeks kepuasan layanan Seksi Pencairan Dana mengalami peningkatan menjadi 4,83 dibandingkan dengan Semester II Tahun 2020 sebesar 4,75. Hal ini dikarenakan adanya Inovasi SARASO yang membantu satker dalam penginputan SKPP yang valid.

Dokumentasi

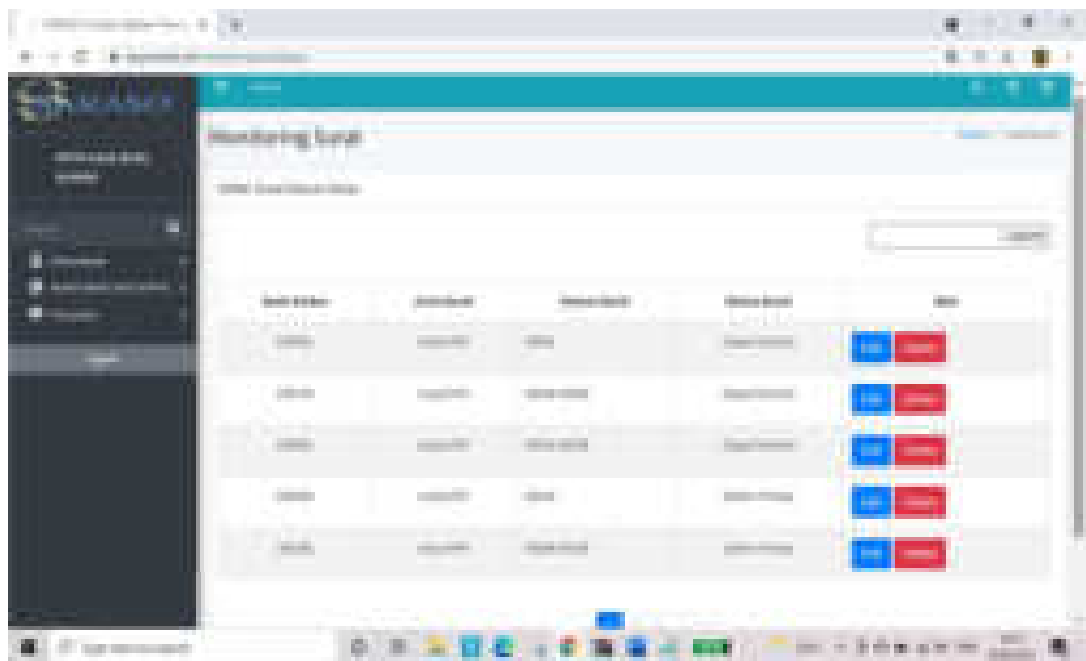
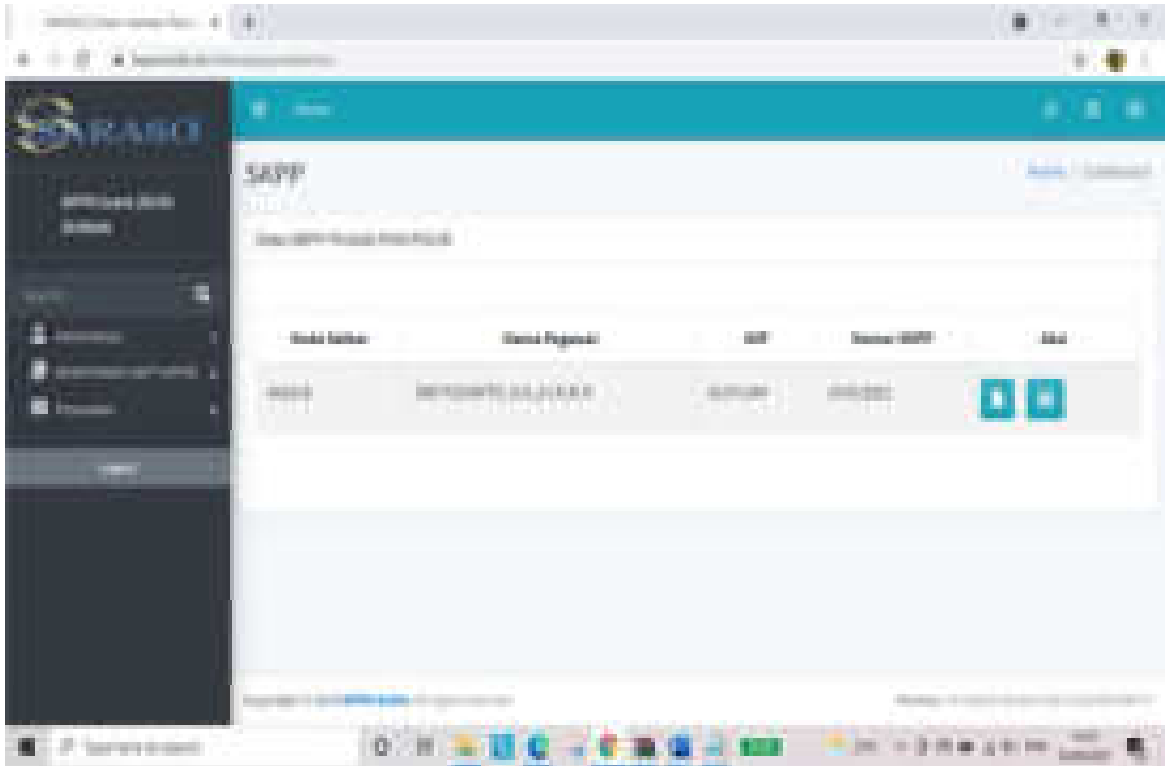
- Printscreen Aplikasi Level KPPN
- Juknis SARASO Level KPPN, Satker dan Administrasi
- ND SARASO
- ND Permohonan Informasi untuk Replikasi oleh KPPN Pacitan

Gambar : Tampilan menu-menu aplikasi saraso



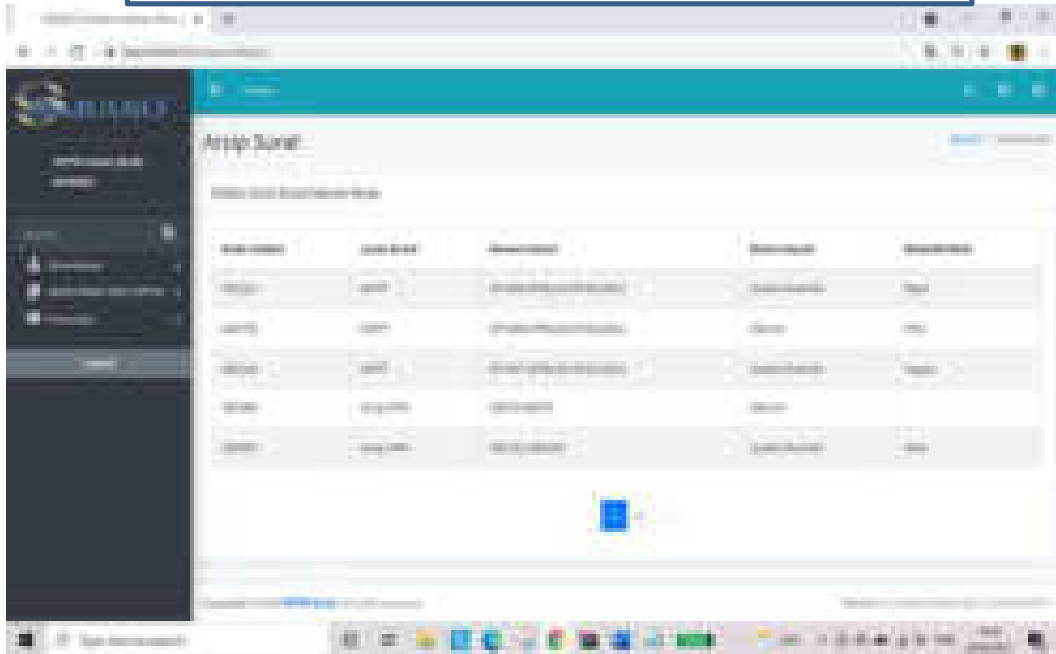
Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Tampilan menu-menu aplikasi saraso



Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : Tampilan menu Arsip Surat pada aplikasi saraso



j. **BAPER (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan)**

Banyaknya aplikasi yang harus dikuasai oleh satker dalam menerima pelayanan KPPN Solok seringkali menimbulkan kesulitan dalam pengoperasian aplikasi oleh operator satuan kerja. Pergantian pengelola keuangan juga menyebabkan perlunya bimbingan-bimbingan khusus kepada operator baru. Mengingat hal tersebut digagas sebuah sistem yang dapat memudahkan operator aplikasi dalam memperdalam pengetahuan terkait aplikasi yang ada di KPPN.

Kondisi Sebelum

Sebelum adanya inovasi BAPER, satuan kerja yang ingin melakukan konsultasi dengan CSO langsung datang ke KPPN dengan permasalahan yang sama tetapi waktu kedatangan berbeda. Hal ini kurang efisien. Sejak tahun 2019 BAPER dilaksanakan secara tatap muka, yaitu datang langsung sesuai dengan aplikasi yang dipilih dengan cara mendaftar melalui tautan pendaftaran BAPER.

Tujuan BAPER adalah untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif ke pada satkersesuai dengan kebutuhan tetapi tetap efisiensi dan efektif.

Narasi Profil KPPN Solok

Kondisi Sesudah

Kondisi pandemi COVID-19 mulai awal tahun 2020 mengharuskan KPPN Solok melakukan akselerasi dan perubahan terhadap setiap bentuk layanan tatap muka pada satuan kerja, tak terkecuali dalam perjalanan inovasi BAPer ini sendiri yang hingga saat ini masih dilakukan secara daring yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Manfaat

Inovasi BAPer (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan) telah memberikan manfaat yang sangat luar biasa, baik itu bagi KPPN Solok namun juga satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut : Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja dan KPPN Solok

- Terdapat peningkatan kinerja anggaran yang diukur by sistem pada rentang tahun 2019 – 2020 dengan rincian kinerja pada tahun 2019 sebesar 94,64% naik menjadi 96,23% di tahun 2020 atau terjadi kenaikan sebesar 1,59%. Hal ini tentunya suatu capaian yang cukup bagus mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung selama sepanjang tahun 2020 sangat berpengaruh dalam kegiatan pelaksanaan anggaran.

- Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan Mitra Kerja KPPN Solok

Kepuasan Pengguna Layanan secara konsisten mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 hingga semester I Peningkatan kepuasan para pengguna layanan pada KPPN Solok ini juga tidak terlepas dari berbagai layanan dan inovasi KPPN Solok yang telah dirasakan manfaatnya oleh para mitra kerja untuk membantu dalam pelaksanaan tugas, salah satunya adalah dengan hadirnya Inovasi BAPer (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan) ini.

Dokumentasi

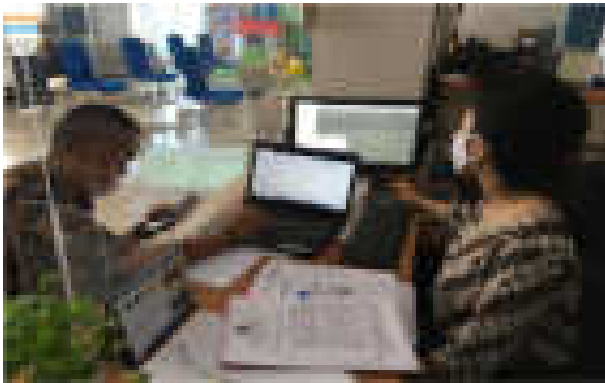
- Statistik permintaan BAPer pada googleform
- Foto pelaksanaan BAPer
- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Gambar : Statistik Pertanyaan Satker



Narasi Profil KPPN Solok

Gambar : BAPer Tatap Muka



Gambar : BAPer On Line



Narasi Profil KPPN Solok

6. Apakah terdapat isu menarik dilingkup kerja saudara yang diamplifikasi ke Publik dalam kurun waktu satu tahun terakhir ? jelaskan

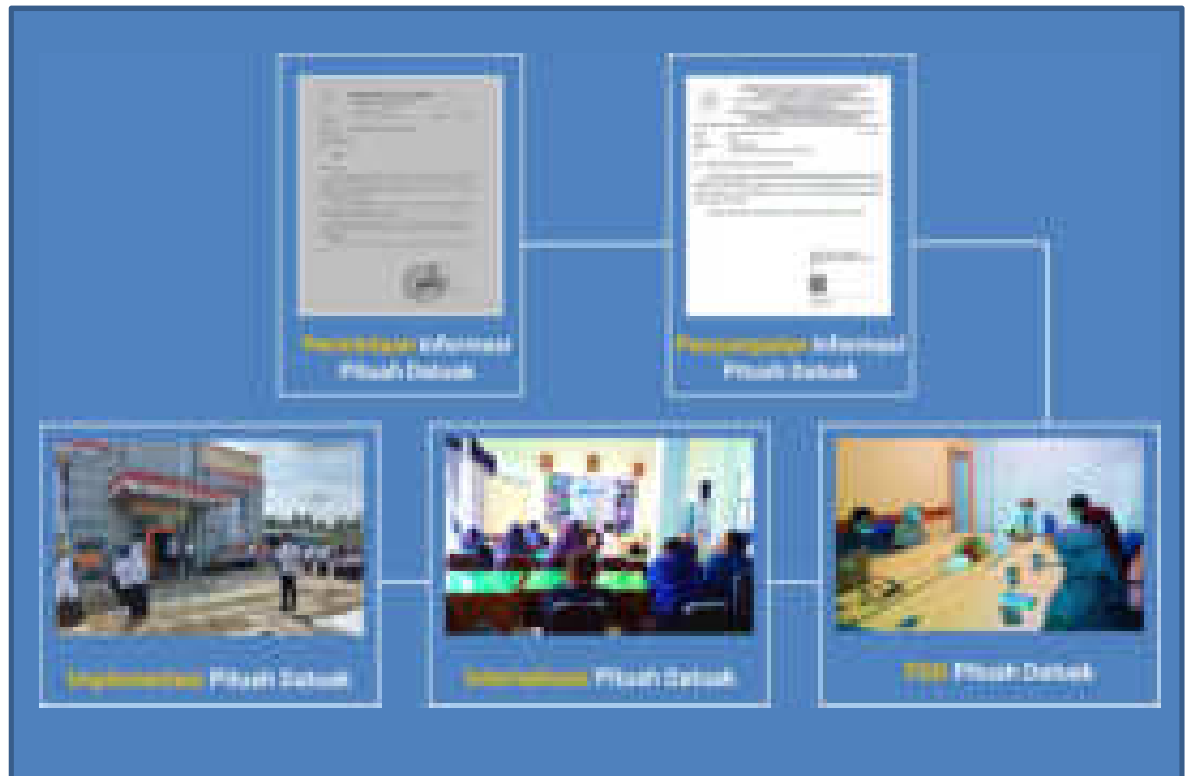
Replikasi inovasi pelayanan publik menjadi salah satu cara dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public. Mereplikasi atau membentuk forum replikasi merupakan media *sharing knowledge* guna memantik kesadaran penyelenggara pelayanan publik akan perlunya mereplikasi suatu inovasi, sesuai konteks masing-masing. Replikasi inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Melalui replikasi, penyelenggara pelayanan publik dapat menerapkan inovasi-inovasi terbaik.

a. Pituah Datuak

Dalam rangka menanamkan budi pekerti yang sesuai dimana orang tua kita mengajarkan kepada anaknya, lalu kepada orang lain, kemudian kepada pegawai dalam meningkatkan kinerja dan output kerja. Pituah Datuak berhasil ditanamkan dalam diri para pegawai sehingga membentuk karakter pegawai serta mampu menginspirasi satuan kerja lainnya untuk menjalankan program serupa (replikasi) demi melestarikan budaya Minangkabau.

Menindaklanjuti Surat Kepala BPS Solok Selatan Nomor : B-78/BPS1310/9281/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 hal izin Duplikasi Inovasi "Pituah Datuak" KPPN Solok telah menjawab surat tersebut melalui surat kepala KPPN Solok Nomor S-107/WPB.03/KP.03/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang penyampaian Profil Inovasi "Pituah Datuak". Latar belakang pentingnya sikap mental pegawai KPPN Solok yang sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Pelayanan, Sinergi, dan Kesempurnaan. Untuk membumikan lagi nilai-nilai tersebut dan meningkatkan aksestabilitas, akan lebih baik apabila dapat menggali nilai-nilai local yang agung dan selaras dalam implementasinya. Inovasi ini hakikatnya adalah menghidupkan kembali Pepatah Petitih Minangkabau yang mengandung nilai-nilai agung local di dalamnya. Petatah Petitih Minangkabau diambil dari Almarhum H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, seorang ulama dan Budayawan Minangkabau terkemuka yang lahir dari Tanah Datar Sumatera Barat pada tanggal 23 Juni 1931 dan meninggal pada 17 April 2001 di Padang Sumatera Barat.

Replikasi Inovasi Pituah Datuak oleh BPS Solok Selatan



b. SARASO

Di masa Pandemi Covid 19 yang membatasi pertemuan langsung dengan mitra kerja, KPPN Solok telah mengembangkan Aplikasi SARASO sebagai salah satu inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para *stakeholders*.

Aplikasi SARASO (Sistem Aplikasi Persuratan dan SKPP Online) merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah Satuan Kerja dalam mengajukan layanan SKPP dan berfungsi sebagai sarana monitoring layanan persuratan.

Aplikasi SARASO dibagi menjadi menjadi tiga role user yaitu User Administrator, User KPPN, dan User Satker. Profil Inovasi, petunjuk teknis penggunaan SARASO adalah sebagaimana terlampir pada Nota Dinas ini.

Narasi Profil KPPN Solok

Aplikasi SARASO merupakan pengembangan digitalisasi layanan persuratan antara KPPN dan Satker, di mana sebelumnya disampaikan secara manual dengan jasa kurir, datang langsung ke kantor, email maupun *Whatsapp* grup.

Terdapat potensi kebermanfaatn serta keberlangsungan penggunaan SARASO sebagai aplikasi pendukung layanan KPPN, seluruh KPPN lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat **dihimbau untuk menggunakan /merekplikasi aplikasi SARASO** di unit kerja masing-masing.

Replikasi Inovasi SARASO oleh KPPN Pacitan



Permintaan Informasi Inovasi



Penyampaian Informasi Inovasi

A. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JANUARI 2022 SATUAN KERJA MITRA KPPN

Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi Aplikasi SAKTI secara menyeluruh pada satuan kerja mitra kerja KPPN Solok di Tahun Anggaran 2022 yang diawali dengan penyusunan gaji induk januari 2022 di bulan Desember 2021 ini, KPPN Solok memberikan pendampingan pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022.



Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh KPPN Solok berlangsung selama 4 (empat) hari, mulai 02 s.d 07 Desember 2021 secara tatap muka dengan jadwal yang diatur sedemikian rupa berupa pembatasan satuan kerja dengan 2 (dua) sesi setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Didalam pendampingan ini, KPPN Solok memberikan penjelasan langkah-langkah yang dimulai dari perekaman referensi awal, rekonsiliasi data pegawai dan data gaji hingga penyusunan SPP, SPM Gaji Induk Januari 2022 sampai dengan keberhasilan pengiriman data ke KPPN Solok.



Kinerja Lainnya

Melalui kegiatan pendampingan, diharapkan pada seluruh satuan kerja dapat berhasil dan lancar dalam mengimplementasikan penyusunan Gaji Induk Januari 2022 melalui SAKTI selain itu juga dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana proses bisnis SAKTI berjalan, karena di Tahun Anggaran 2022 seluruh kegiatan transaksi keuangan, yang berupa perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dilaksanakan menggunakan SAKTI.

B. Kegiatan Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Solok

Kamis, 09 Desember 2021 bertempat di AULA KPPN Solok, mulai pukul 14.00 WIB diselenggarakan kegiatan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022 kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Solok.



1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Solok,
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok,
3. Kepala lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Solok,
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok,
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Solok Selatan.

Kinerja Lainnya

Pada kegiatan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022 ini, Kepala KPPN Solok dalam sambutannya menyampaikan agar setelah momentum penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022 ini, para pengelola keuangan dapat segera mempelajari dan merencanakan kegiatan sepanjang tahun 2021 yang disesuaikan dengan ketersediaan penganggaran dalam DIPA. Menyiapkan segala administrasi dalam persyaratan pencairan, termasuk apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat pengadaan dan kontraktual dapat disegerakan pelaksanaannya pada awal tahun anggaran.

C. Success Story : Membangun Kreatifitas Nagari

Usaha pembentukan Nagari Pakan Rabaa Utara telah mulai dirintis dari tahun 2001, yang akhirnya terwujud setelah dimekarkannya [Kabupaten Solok Selatan](#) dari [Kabupaten Solok](#). DPRD Kabupaten Solok Selatan menyetujui pemekaran Nagari Pakan Rabaa Utara pada 11 Desember 2006 dan sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan DPRD.



Nagari Pakan Rabaa Utara adalah salah satu [nagari](#) yang saat ini masuk ke dalam wilayah [Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, Indonesia](#). Nagari ini secara administratif mulai berdiri pada 28 Oktober 2007 sebagai hasil pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa. Luas Nagari: 182,89 kilometer persegi, Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 14 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 52 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 106 kilometer. Nagari Pakan Rabaa Utara berpenduduk 5458 jiwa (2017) terdiri dari 2865 laki-laki dan 2593 perempuan, serta 1306 rumah tangga. Wilayah Nagari Pakan Rabaa Utara memiliki topografi bergelombang dan memanjang dari [utara](#) ke [selatan](#) dengan luas sekitar 182,89 km². Wilayah nagari ini berbatasan dengan [Taman Nasional Kerinci Seblat](#) di sebelah [timur](#) sedangkan di sebelah [barat](#) terdapat kawasan [perbukitan](#) yang bisa dimanfaatkan tetapi agak terbatas karena kondisi kemiringan bukit.

Kinerja Lainnya

Mata pencaharian penduduk umumnya bergerak di sektor [pertanian](#), [perdagangan](#), dan [wiraswasta](#). Penyebaran penduduk merata di setiap jorong dan di daerah bertanah kering yang cocok dijadikan sebagai kawasan permukiman. Namun, dari sekian banyak jumlah penduduk Nagari Pakan Rabaa Utara, kaum perempuan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Hal ini disebabkan karena penduduk laki-laki banyak yang [merantau](#) meninggalkan kampung halamannya. Mayoritas penduduk Nagari Pakan Rabaa Utara adalah masyarakat [Minangkabau](#), yang terdiri beberapa suku, seperti [Chaniago](#), [Koto](#), [Tanjuang](#), [Panai](#), Balai Mansiang, Kutianyir, Bendang, dan [Malayu](#). Setiap suku dikepalai oleh seorang kepala suku masing-masing yang dipilih secara langsung. Adapun jorong yang ada di Nagari Pakan Rabaa Utara disajikan data sebagai berikut :

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah telah menggulirkan Dana Desa kepada Nagari Pakan Rabaa Utara sebesar Rp.1.390.393.747,-. Bantuan program Dana Desa yang digulirkan ke Nagari Pakan Rabaa Utara telah berhasil dioptimalkan diberbagai bidang yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat di Nagari. Salah satu penyaluran dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 100 KPM dengan besaran Rp.300.000,- per KPM per bulan. Sampai dengan saat ini sudah menyalurkan BLT sampai dengan bulan September. Diharapkan masyarakat Nagari dapat memanfaatkan Dana Desa demi kemaslahatan bersama.

Untuk peningkatan sektor perekonomian masyarakat, Dana Desa digunakan melalui mekanisme BUMNag. Dikelola secara modern, perekonomian Nagari Pakan Rabaa Utara berhasil dikembangkan dan mampu membuka lapangan kerja baru melalui pemanfaatan potensi yang ada antara lain melalui peternakan sapi berikut pengelolaan pakan sapi dari sisa jerami hasil panen di bawah bimbingan lembaga pendidikan serta penyewaan perlengkapan pesta.

BUMNag Nagari Pakan Rabaa Utara memulai usaha peternakan sapi mulai tahun 2021 dengan membeli 19 ekor indukan betina dan 4 anakan dan akan dikembangkan lagi menyesuaikan keuntungan dari usaha lainnya yang dikelola BUMNag.

BUMNag Nagari Pakan Rabaa Utara memiliki beberapa unit peralatan berupa meja, kursi, dan tenda/kanopi, yang digunakan untuk menjalankan usaha penyewaan peralatan pesta yang dimulai pada tahun 2017. Tarif penyewaan dikenakan berbeda untuk warga Nagari Pakan Rabaa Utara dengan warga di luar. Pengembangan usaha diharapkan bisa menambah pendapatan Nagari dan dimaksimalkan untuk kemaslahatan masyarakat nagari.

Dana Desa yang ada juga digunakan untuk meningkatkan kualitas dan layanan publik di nagari, yaitu dengan membangun jalan di nagari. Pembangunan jalan berhasil merubah yang sebelumnya jalan tanah yang becek dan tergenang pada musim hujan ditingkatkan menjadi jalan dengan semenisasi. Diharapkan pembangunan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga untuk kualitas hidup yang lebih baik dan mengembangkan ekonomi masyarakat nagari.

Keberhasilan penggunaan Dana Desa Nagari Pakan Rabaa Utara tidak terlepas dari sinergi yang dibangun seluruh masyarakat nagari bersama perangkat Nagari. Kunci sukses ini didukung oleh transparansi pengelolaan Dana Desa oleh perangkat Nagari, kerukunan warga yang terpelihara, rasa persaudaraan yang erat, solidaritas yang tinggi, rasa saling percaya, saling menjaga, dan saling memiliki.

D.Success Story Dana Desa : Kopi dari Nagari Untuk Negeri

Nagari Pauh Duo Nan Batigo adalah salah satu nagari yang terletak pada Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada Kabupaten Solok Selatan. Nagari dengan luas 66,70 kilometer persegi dengan jumlah jiwa sebanyak 2993 jiwa, dimana 1572 jiwa diantaranya adalah laki-laki dan sisanya yaitu sebanyak 1421 jiwa adalah perempuan. Kegiatan ekonomi masyarakat di nagari ini masih didominasi oleh bidang pertanian dan perkebunan. Adapun beberapa potensi Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdapat pada nagari ini adalah bijih besi, andesit yang tersebar merata, batu kapur dengan sumberdaya diperkirakan 1.277.000.000 meter kubik, dan energi panas bumi yang merupakan sumber air panas dengan suhu 40-50 derajat *celcius* yang berasosiasi dengan sumber air permukaan yang melimpah sehingga dapat menghasilkan energi listrik.



Nagari Pauh Duo Nan Tigo terdiri dari 4 jorong, yakni :

1. Jorong Taratak Bukareh
2. Jorong Paninjauan
3. Jorong Bukit Sikumpa
4. Jorong Pinang Awan
5. Jorong Koto Tuo
6. Jorong Tanjuang

Kinerja Lainnya

Nagari Pauh Duo Nan Batigo ini memiliki keindahan alam yang dramatik. Daerah ini memiliki kawasan perbukitan baik di sisi barat maupun timur dengan hutan yang masih asri dan dialiri sungai-sungai kecil. Kawasan hutan di sebelah timur merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Keberadaan hutan ini merupakan sumber keanekaragaman hayati yang patut dilestarikan keberadaannya.

Selain potensi hutan hujan tropis, Nagari Pauh Duo Nan Batigo memiliki banyak sumber air panas. Sumber air panas yang cukup terkenal adalah Sumber Air Panas Sapan Maluluang. Sumber air panas ini berada di Jorong Ampalu Dalam (Pinang Awan). Hal ini menyebabkan Nagari Pah Duo Nan Batigo memiliki potensi wisata alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan.

Penyaluran Dana Desa

Dana desa yang telah disalurkan pada tahun 2021 untuk Nagari Pauh Duo Nan Batigo ini sudah mencapai Rp 492.210.960 dan BLT sebanyak Rp 210.000.000. Dana desa ini telah digunakan untuk membangun beberapa Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) diantaranya adalah perkebunan kopi serta gedung olahraga yang nantinya dapat disewakan dan dibangun tepat disamping kantor nagari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha dalam pemberdayaan masyarakat nagari dan membuka lapangan pekerjaan bagi generasi di Nagari, yang nantinya akan memberikan pemasukan yaitu Pendapatan Asli Nagari (PAN).



Untuk itu, Nagari Pauh Duo Nan Batigo telah mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dengan nama "Alam Marinteh Mandiri" berupa perkebunan kopi. Perkebunan kopi yang saat ini sedang dikembangkan dengan luas lahan 15 hektar, sementara sudah ditanami seluas 12 hektar. Lahan perkebunan kopi ini berada diketinggian 1.300 Mdpl ini sudah ditanam sejak awal tahun 2017 sebanyak 30 ribu batang. Saat ini, sudah memulai masa produksi dengan luas tanam 12 hektar.

Adapun sebagian dari dana desa digunakan untuk pembiayaan pembersihan lahan sebelum digunakan untuk menanam kopi. Rencananya perkebunan kopi ini akan dijadikan lokasi agrobisnis, di mana nagari akan berusaha mendirikan pabrik pengelolaan kopi hingga menjadi bubuk kopi siap saji. Nantinya pengunjung bisa menikmati perkebunan ini sambil menikmati suguhan kopi, sekaligus cara pengolahannya dari awal hingga siap diminum. Hal ini tentu saja masih di bawah binaan Starbuck Training Center, Berastagi Medan. Semua proses penanaman hingga menjadi besar berdasarkan petunjuk yang diberikan. Lahan Kopi

Kinerja Lainnya

yang berada di hulu Bangko ini berjenis Arabika. Saat ini BUMNag itu baru fokus pada satu kegiatan saja yaitu perkebunan kopi. Hasil panen kopi akan dijual secara mentah maupun telah berupa biji kering ke para distributor kopi yang ada.

E. Penyerahan Penghargaan Satuan Kerja Berprestasi Periode Semester I 2021 Lingkup KPPN Solok

Bertempat di AULA KPPN Solok, hari Kamis 05 Agustus 2021 diselenggarakan kegiatan penyerahan penghargaan pada Satuan Kerja Berprestasi periode Semester I Tahun 2021 lingkup pembayaran KPPN Solok. Masih dengan memperhatikan penerapan protokol Kesehatan di masa pandemi, penyelenggaraan kegiatan ini terbatas dengan mengundang para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang mewakili pada setiap Satuan Kerja berprestasi.



Penyerahan penghargaan pada periode ini merupakan yang pertama setelah adanya relaksasi penilaian pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di periode sebelumnya. Kegiatan yang dihadiri secara langsung oleh beberapa Pejabat / Kepala Satuan Kerja Berprestasi, antara lain Kapolresta Solok, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Solok, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat, Kepala Balai Penelitian Tanaman Buah (BALITBU) Tropika serta para Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat yang mewakili pada beberapa satuan kerja lain berjalan khidmat.

Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Solok Bapak Budi Utomo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada seluruh Satuan Kerja berprestasi yang telah berhasil meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada Semester I Tahun

Kinerja Lainnya

2021, disamping itu juga disampaikan gambaran umum mekanisme dan indikator-indikator yang menjadi unsur penilaian Satuan Kerja berprestasi yang dihasilkan secara otomatis *by system* melalui aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) serta berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada bagian penutup sambutan juga disampaikan pesan bahwa seluruh layanan KPPN Solok bebas dari biaya serta permohonan dukungan untuk KPPN Solok dalam mengikuti penilaian Pembangunan Zona Intergitas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tingkat nasional yang pada saat ini sedang di ikuti.

Berikut daftar satuan kerja berprestasi periode Semester I Tahun 2021 lingkup pembayaran KPPN Solok berdasarkan kategori :

Peringkat Tiga Besar Hasil Penilaian Satuan Kerja Berprestasi berdasarkan Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama : Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Solok (552996) dengan nilai 97,50;
2. Peringkat Kedua : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Solok Selatan (299610) dengan nilai : 97,00;
3. Peringkat Ketiga : Pengadilan Negeri Kotobaru (400447) dengan nilai : 93,00;

Peringkat Lima Besar Hasil Penilaian Satuan Kerja Berprestasi berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Kategori Pagu Jenis Belanja yang bisa dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan sampai dengan 2,4 Milyar adalah sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok (527819) dengan nilai 100;
2. Peringkat Kedua : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Solok Selatan (299610) dengan nilai : 99,59;
3. Peringkat Ketiga : Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Solok Selatan (424801) dengan nilai : 98,99;
4. Peringkat Keempat : Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Solok Selatan (601791) dengan nilai : 98,71;
5. Peringkat Kelima : Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Solok (601763) dengan nilai : 98,03;

Peringkat Lima Besar Hasil Penilaian Satuan Kerja Berprestasi berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Kategori Pagu Jenis Belanja yang bisa dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan diatas 2,4 Milyar adalah sebagai berikut :

1. Peringkat Pertama : Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (412050) dengan nilai : 97,95;
2. Peringkat Pertama : Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan (667193) dengan nilai : 97,59;
3. Peringkat Ketiga : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok (525212) dengan nilai : 97,13;
4. Peringkat Keempat : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat (567449) dengan nilai : 97,06;
5. Peringkat Kelima : Polres Solok Kota (665988) dengan nilai : 95,98;

Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Solok untuk terus menjaga dan

meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di periode mendatang. Menciptakan satuan kerja yang berprestasi tidak hanya di lingkup KPPN Solok, namun di tingkat wilayah bahkan di tingkat nasional.

F. Implementasi Aplikasi e-Jafung Dan Pengisian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Hari Selasa, 07 Juli 2021 Bertempat di ruang rapat KPPN Solok diselenggarakan kegiatan pengimplementasian dan pengisian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Kredit) pada Aplikasi e-Jafung bagi para Pejabat Fungsional satuan kerja yang menjadi mitra kerja KPPN Solok, terutama yang berada wilayah kota dan kabupaten Solok.



Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN Solok ini menjadi salah satu bentuk koordinasi antara seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Solok dengan para pejabat fungsional, terutama Pranata Keuangan APBN (PK APBN) yang penilaiannya menjadi kewenangan KPPN Solok. Dalam kegiatan ini disampaikan bagaimana panduan terkait dengan perhitungan dan pengisian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Kredit), selain itu kepada para Pranata Keuangan APBN (PK APBN) juga diberikan kesempatan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam penginputan dan perhitungan angka kredit sehingga dapat dicarikan solusi Bersama.



Melalui kegiatan ini, diharapkan para Pranata Keuangan APBN (PK APBN) mitra KPPN Solok mendapatkan gambaran terkait bagaimana pengisian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Kredit) pada Aplikasi e-Jafung, termasuk juga melaksanakan beban kerja secara optimal sehingga angka kredit yang telah ditetapkan dapat tercapai.

G. Rapat Progres Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Bertempat di AULA KPPN Solok, diselenggarakan rapat bersama membahas progres pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Solok yang merupakan agenda rutin setiap bulan untuk mengukur pencapaian pembangunan Zona Integritas (ZI) terhadap target.



Kinerja Lainnya

Kegiatan yang di pimpin langsung oleh Kepala KPPN Solok, Bapak Budi Utomo ini berlangsung cukup lancar. Didalam kegiatan, dijelaskan target capaian dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), selain itu juga disampaikan beberapa perubahan-perubahan yang menjadi pembeda kegiatan ketika KPPN Solok melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di periode sebelumnya dengan saat ini. Beberapa inovasi-inovasi yang diciptakan pada saat ini bertujuan mendukung dalam kemudahan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mendapatkan layanan KPPN Solok termasuk menjadi bagian dari proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM.



Kegiatan rapat progres yang dilaksanakan secara berkala ini tentunya sangat bermanfaat membantu sebagai bagian monitoring kegiatan evaluasi dan pengawasan antara target dan capaian. Harapan lain tentunya dengan kegiatan ini, seluruh unsur pegawai dan PPNPN pada KPPN Solok mengetahui secara menyeluruh setiap bentuk pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dilaksanakan KPPN Solok.

H. Rapat Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM KPPN Solok

Bertempat di ruang rapat KPPN Solok, hari Kamis 03 Juni 2021 mulai pukul 16.00 WIB dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada KPPN Solok.

Tujuan dari kegiatan rapat ini adalah untuk monitoring dan evaluasi *progress* pembangunan Zona Integritas (ZI) yang telah dicapai oleh KPPN solok dan rencana target kedepan yang masih harus dilaksanakan sepanjang tahun 2021 hingga periode penilaian WBBM. Melalui kegiatan seperti ini yang dilaksanakan secara berkala atau rutin, tentunya membantu memudahkan dalam melakukan inventarisir setiap hal-hal yang perlu penyempurnaan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM termasuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi dalam proses verifikasi penilaian dimaksud.



Meskipun setiap tahapan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBBM KPPN Solok sampai saat ini telah berjalan sesuai target, namun melalui kegiatan rapat pembahasan hasil monitoring dan tindak lanjut diharapkan bisa menjadi salah satu pengingat bahwa proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM pada KPPN Solok masih terus berjalan dan harus dikawal hingga KPPN Solok mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



I. Sharing Session Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok

Hari Rabu, 02 Juni 2021 bertempat di AULA Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, diselenggarakan kegiatan sosialisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok.



KPPN Solok dalam kegiatan ini hadir untuk memberikan *sharing session* terkait pengalaman sebagai salah satu instansi vertikal di wilayah solok berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat nasional yang telah ditetapkan oleh KemenPAN RB. Kepala KPPN Solok, Bapak Budi Utomo selaku narasumber memaparkan terkait sejarah bagaimana perjalanan KPPN Solok mulai dari kegiatan penancangan hingga berhasil mendapatkan penetapan predikat WBK. Secara sederhana dijelaskan upaya-upaya dalam pemenuhan berbagai dokumen, perbaikan sarana dan prasarana pendukung layanan termasuk komitmen seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian WBK.

Harapannya melalui kegiatan *sharing session* ini, KPPN Solok dapat terus menularkan semangat dalam pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM) kepada instansi-intansi pemerintahan yang berada disekitar Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok, serta secara khusus pada kantor pertanahan Kabupaten Solok yang telah memulai komitmen dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).



J. Bimbingan Teknis Roll Out SAKTI, Overview SAKTI dan Pendaftaran Pengguna SAKTI dan One Time Password (OTP) SAKTI

Bertempat di ruang rapat KPPN Solok, pada hari Rabu 17 Maret 2021 mulai pukul 13.30 WIB, KPPN Solok menyelenggarakan bimbingan teknis berkaitan dengan persiapan implementasi SAKTI *full module* yang akan diterapkan secara menyeluruh pada seluruh satuan kerja.



Kinerja Lainnya

Pada kegiatan ini, dipaparkan berkaitan dengan persiapan implementasi SAKTI *full module* bagi seluruh satuan kerja yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sebelum implementasi penuh, tentu harus ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan, terutama dari satuan kerja yang nantinya menjadi pengguna SAKTI.



Berbagai persiapan yang harus segera dilakukan oleh satuan kerja antara lain penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya menjadi pengguna SAKTI, karena sebagaimana dijelaskan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ini bahwa terdapat banyak perubahan dan penyesuaian ketika peralihan ke SAKTI dari aplikasi existing selama ini digunakan, meliputi Aplikasi SAS, SAIBA, Persediaan serta SIMAK BMN. Tentu perlu diberikan gambaran secara umum pada pengelola keuangan satuan kerja, mulai dari bagaimana tampilan aplikasi, pembagian *user* pengguna per modul hingga sistem keamanan yang diterapkan seperti *one time password* (OTP).

Di akhir kegiatan, KPPN Solok menyampaikan harapan dukungan yang terbaik bagi seluruh pengelola keuangan yang menjadi mitra kerja dalam mempersiapkan implementasi SAKTI. Kedepan, KPPN Solok secara berkala akan melaksanakan bimbingan teknis pada satuan kerja melalui training aplikasi SAKTI per modul sepanjang tahun 2021. KPPN Solok mengajak seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan koordinasi sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani dengan baik, sehingga pada waktu implementasi SAKTI di tahun 2022 seluruh tahapan dapat berjalan normal.

K. Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian Output dan Juknis Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021

Menjadi tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku BUN di daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran belanja K/L, salah satu yang diukur dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terkait dengan konfirmasi capaian output.



KPPN Solok dalam rangka mendukung peningkatan kualitas data capaian output, melakukan bimbingan teknis (bimtek) terkait dengan mekanisme pelaporan data capaian output serta juknis reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19, bertempat di ruang rapat KPPN Solok, kegiatan dilaksanakan melalui *zoom meeting* dengan peserta para pengelola keuangan satuan kerja mitra kerja KPPN Solok.

Kinerja Lainnya

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola keuangan satuan kerja mendapatkan gambaran bagaimana teknis pelaporan data capaian output serta perhitungan reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021. KPPN Solok selalu mendorong peningkatan kualitas data capaian output satuan kerja mitra kerja secara *by sistem* melalui aplikasi SAS/ SAKTI.

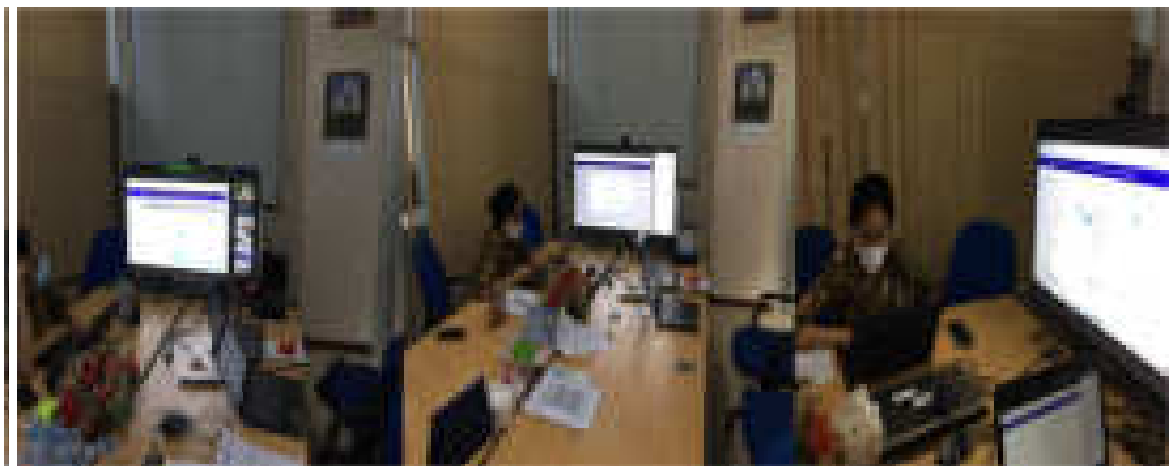
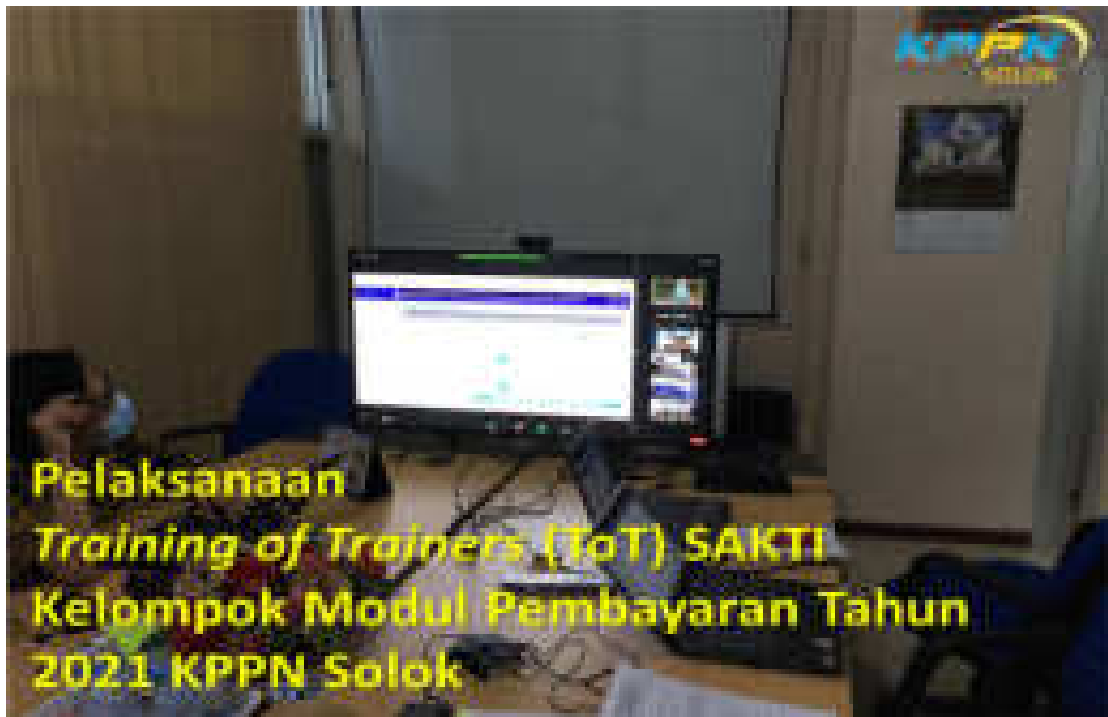


Data capaian output yang di isikan oleh satuan kerja mitra kerja diharapkan mencerminkan kondisi pada satuan kerja, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kedepannya. Melalui penjelasan reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021, satuan kerja juga didorong untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dengan memahami dan mengimplementasikan teknis detail penilaian pada setiap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2021

L. Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) SAKTI Kelompok Modul Pembayaran Tahun 2021 KPPN Solok

Bertempat di Ruang Rapat KPPN Solok dan berlangsung selama 5 (lima) hari mulai 04 April s.d 09 April 2021, beberapa pegawai KPPN Solok mengikuti pelaksanaan kegiatan *Training of Trainers* (TOT) SAKTI Modul Pelaksanaan Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) secara daring melalui *zoom meeting*.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan dari persiapan implementasi SAKTI *Web Full Module* kepada seluruh satuan kerja pada tahun 2022. *Training of Trainers* (TOT) ini adalah untuk menyiapkan para pegawai yang nantinya menjadi trainer bagi satuan kerja di daerah dalam kegiatan persiapan pelatihan SAKTI *Web Full Module*.



Materi yang disampaikan pada kegiatan *Training of Trainers* (ToT) SAKTI ini adalah berkaitan dengan modul pelaksanaan, dimana hal tersebut meliputi bagaimana perekaman supplier, kontrak, termasuk pembuatan SPP dan SPM pada aplikasi SAKTI *Web Full Module*. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat banyak tercipta para trainer di KPPN sehingga bisa membantu serta ikut mendukung kelancaran implementasi SAKTI *Web Full Module* pada satuan kerja.

M. Perbendaharaan Menyapa KPPN Solok Goes to School (SMKN 1 Kota Solok)

Sebagai bagian rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 tahun 2021, pada hari Jum'at pagi, 26 Februari 2021 KPPN Solok menyelenggarakan "Perbendaharaan Menyapa KPPN Solok Goes to School" dengan mengunjungi sekolah di seputar wilayah KPPN Solok berada.



Pada kegiatan perbendaharaan menyapa kali ini, KPPN Solok berkesempatan berkunjung ke SMKN 1 Kota Solok. Adapun agenda kegiatan kali ini adalah untuk lebih mendekatkan dan memperkenalkan tugas dan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan ngara (KPPN) di daerah kepada para siswa. Kegiatan yang dipusatkan di ruang AULA SMKN 1 Kota Solok ini dihadiri oleh perwakilan guru dan siswa yang terlihat cukup antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Kepala KPPN Solok, Bapak Budi Utomo pada kesempatan ini ikut serta memberikan penjelasan atau gambaran umum pada para siswa terkait dengan apa yang menjadi tugas KPPN di daerah.



Rangkaian kegiatan ini sebagai upaya untuk memperkenalkan peranaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini secara khusus KPPN Solok sebagai pelaksana di daerah mendapatkan antusiasme dari para siswa yang mengikuti. Materi yang di bawakan secara santai serta diberikan selingan games-games berhadiah menambah semarak kegiatan ini.

KPPN Solok berharap dengan kegiatan semacam ini yang rutin dilakukan setiap tahunnya, baik pada lingkungan sekolah-sekolah, universitas atau masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas umum diharapkan bisa lebih mudah dalam memperkenalkan tugas, peranan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di daerah yang keberadaannya ditandai dengan kehadiran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

N. Bimbingan Teknis Sistem/Aplikasi Digital Payment Marketplace

Selama 3 (tiga) hari mulai Selasa s.d Kamis, 09 - 11 Februari 2021 diselenggarakan bimbingan teknis sistem / aplikasi *digital payment (digipay) marketplace* oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan peserta perwakilan dari seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di seluruh Indonesia.

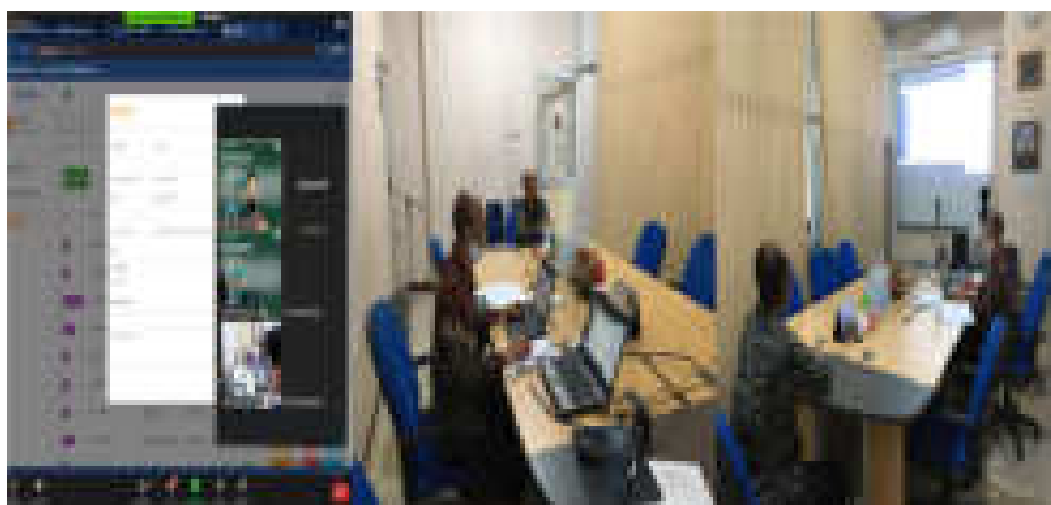
Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan salah satu bentuk memperkenalkan aplikasi *digital payment marketplace* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan Perbankan yang tergabung dalam HIMBARA yaitu BRI, BNI dan Mandiri. Didalam kegiatan ini sendiri KPPN Solok menugaskan pegawai pada manajemen satuan kerja untuk mengikuti agar dapat lebih memahami dan mendalami bagaimana implementasi kedepan pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Solok.

digital payment marketplace merupakan salah satu bentuk inovasi pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi berupa dukungan sistem pembayaran dan aktifitas jual beli secara *online*.



Harapannya dengan sistem baru ini bisa lebih menjangkau sasaran yang lebih luas, seperti UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah termasuk dengan berbagai fasilitas kemudahan sistem pembayaran yang didukung oleh pihak perbankan.

KPPN Solok sendiri berkomitmen untuk ikut serta dalam menyukseskan implementasi *digital payment marketplace* pada satuan kerja di wilayah kerjanya dengan beberapa perencanaan kedepannya, mulai dari bimbingan teknis pada satuan kerja, monitoring kesiapan sumber daya manusia (SDM) pada satuan kerja, kesiapan dukungan dari pihak perbankan termasuk juga melakukan inventarisir vendor-vendor penyedia barang dan jasa.



BAB IV

PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat kami disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari evaluasi dan analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian target IKU sangat menggembirakan. Hal ini berarti bahwa pencapaian target secara rata-rata telah berjalan dengan baik yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia, peralatan dan peraturan perundang-undangan yang memadai.
2. Untuk perencanaan kinerja pada masa yang akan datang dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul maka perlu memperhatikan hal-hal berikut ini :
 - a. Meningkatkan jumlah pelatihan Sumber Daya Manusia yang tersedia untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek untuk satker-satker dalam wilayah pembayaran KPPN Solok.
 - c. Meningkatkan ketersediaan peralatan secara kuantitas dan kualitas.
 - d. Mengupayakan mutasi internal secara terpola dan teratur untuk mengatasi kejenuhan dalam melaksanakan tugas.



KONTRAK KINERJA
NOMOR : 090/PB.12/2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SOLOK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesanggupan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N Nilai kualitas LE Kuasa BUN KPPN	94
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan koordinasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		4b-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	70%
		4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		6b-CP Nilai kinerja penyuluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan dana capaian output stakeholder	89
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UARPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		7b-N Persentase L/P Berstatus yang andal dan tepat waktu	98%
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP Presentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N Presentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Kasua Bendahara Umum Negara

Anggaran
Rp. 1.771.858.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Padang, 27 Januari 2021
Pimpinan Unit Kerja,


Hana Purnama Nugroho
NIP. 19721122 199803 1 002


Budi Utomo
NIP. 19700324 199603 1 001

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Kode SKY EKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sem 1	Q3	1-3 Q 1	Q4	T
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel							
1a-N	Nilai kualitas LK Ekasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	94	94
II	Birokrasi dan layanan publik yang agik, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan sater terhadap layanan KPPN	-	4,64 <small>(skala 5)</small>	4,64 <small>(skala 5)</small>	-	4,64 <small>(skala 5)</small>	-	4,64 <small>(skala 5)</small>
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel							
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
IV	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan							
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87,5	87,5	-	87,5	87,5	87,5
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	15%	15%	-	15%	30%	30%
4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	13%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
V	Pengelolaan kas yang optimal							
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 <small>(skala 4)</small>	3,15 <small>(skala 4)</small>	3,15 <small>(skala 4)</small>	3,15 <small>(skala 4)</small>	3,15 <small>(skala 4)</small>	3,15 <small>(skala 4)</small>	3,15 <small>(skala 4)</small>
VI	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien							
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	89	89	89	89	89
6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	90	90	90	90	90	90

Kode SK IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sem 1	Q3	1.d.Q 3	Q4	Y
6C-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output seker	89	89	89	89	89	89	89
VII	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, tanggap dan tepat waktu							
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan akurat	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%
7b-N	Persentase LPJ Serdabasa yang akurat dan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
VIII	Organisasi dan SDM yang optimal dan berketerja tinggi							
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Fomul Organizational	-	-	-	-	-	84	84
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
8c-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	-	-	-	-	-	78	78
IX	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKN	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	82	82
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	-	30%	30%	-	30%	100%	100%
X	Sistem informasi dan teknologi yang akurat							
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	30%	30%	-	30%	80%	80%

Palang, 27 Januari 2021

PNS yang diteliti,



Budi Utomo
NIP. 19700324 196005 1 031

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Hera Padyo Nugroho	1	Nama	Budi Utomo
2	NIP	19721112 199803 1 001	2	NIP	19700324 199603 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama/Muda IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I IV/b
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor/Ditjen/Perbendaharaan/Provinsi Sumatera Barat	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan/Perbendaharaan Negara Sekolah

No	III. KEGIATAN TUGAS POROK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS OUTPUT	KUALITAS MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN KPN yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
2	Mewujudkan kepuasan user terhadap layanan KPN	-	6,4 (skala 5)	100	12 bln	-
3	Menyelesaikan SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	12 bln	-
4	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87,3	100	12 bln	-
5	Melaksanakan implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	30%	100	12 bln	-
6	Melaksanakan implementasi Aplikasi GAKTI	-	100%	100	12 bln	-
7	Mewujudkan akurasi perencanaan kas	-	82%	100	12 bln	-
8	Mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang efektif	-	3,18 (skala 4)	100	12 bln	-
9	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	89	100	12 bln	-
10	Memenuhi nilai kinerja penyediaan	-	90	100	12 bln	-

No	INDIKATOR KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			BIAYA
			KUANTITAS OUTPUT	KUALITAS MUTU	WAKTU	
	Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa					
11	Meningkatkan partisipasi pelaporan data capaian output setiap	-	89	100	12 bln	-
12	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
13	Mewujudkan LPI berdasarkan yang andal dan tepat waktu	-	98%	100	12 bln	-
14	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	-	84	100	12 bln	-
15	Mewujudkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang baik	-	83	100	12 bln	-
16	Mewujudkan nilai rata - rata hasil competency pegawai KPPN yang baik	-	78	100	12 bln	-
17	Mewujudkan pelaksanaan anggaran di KPPN yang berkualitas	-	95,5%	100	12 bln	1.770.858.000,-
18	Memenuhi nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	82	100	12 bln	-
19	Meningkatkan kualitas pengelolaan BMDN	-	100%	100	12 bln	-
20	Melaksanakan implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	80%	100	12 bln	-

Padang, 27 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Budhi Irena

NIP. 19703324 199603 1 001

Pejabat Pembina



Yeri Pudji Nugroho

NIP. 19721212 199803 1 002

RENCANA KERJA TAHUNAN BERGAMBAR 2011
EPPIB KOLON

No	Uraian Job/Program	Berkas: 11/01/2011 10:00:00 AM												Pemb. Kegiatan	Berkas Data	RIT			
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Subprogram 10000																			
1	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	10.000.000
2	Penyusunan laporan keuangan																	Impress yang diupload	4.000.000
3	Penyusunan dan pelaksanaan program																	upload program	101.241.000
4	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	111.000.000
5	Penyusunan dan pelaksanaan program																	upload program	80.000.000
6	Penyusunan dan pelaksanaan program																	upload program	100.000.000
7	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	100.111.000
8	Penyusunan dan pelaksanaan program																	upload program	11.400.000
9	Penyusunan dan pelaksanaan program																	upload program	10.000.000
Subprogram 20000																			
1	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
2	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
3	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
4	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
Subprogram 30000																			
1	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
2	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
3	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
4	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
Subprogram 40000																			
1	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
2	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
3	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000
4	Penyusunan dan pelaksanaan program																	Impress yang diupload	5.000.000

Indonesian 4th Semester Simulation																							
Program																							1,000,000

No.	Project Name/Project	Monthly Allocation/Period (Month)												Project Budget (Rp.)
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	

1	Penelitian Awal Penelitian																							
2	Penelitian Awal Berimbang / Term																							
3	Penelitian Awal Berimbang / Equity																							
4	Penelitian Awal / Debt																							
5	Penelitian Awal																							
6	Menor Anggaran / Berdasarkan nilai																							
7	Berimbang / Berdasarkan Perhitungan																							
8	PKS																							



PENCAPAIAN KINERJA

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

KPPN Sektor
2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian	%
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Perencanaan yang akurat, tepat dan produktif	Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	64	69,39	108,73%
2	Siklus dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap layanan KPPN	4,54	4,54	104,31%
3	Perencanaan optimal dan otomatis yang kredibel	Pemertaaan penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4	100	100,60%
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,3	93,79	107,79%
5	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat pertambahan	50	76,59	153,16%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100	100	100,00%
7	Akurasi dan pelaporan keuangan negara yang akurat, tepat, dan tepat waktu	Persentase akurasi perencanaan kas	52	100	121,96%
8	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	1,18	4	126,86%
9	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KOL	89	97,04	109,03%
10	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja penyelenggaraan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,09	110,00%
11	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Sarban	89	100	112,36%
12	Akurasi dan pelaporan keuangan negara yang akurat, tepat, dan tepat waktu	Persentase realisasi tingkat LARIPA secara tepat waktu dan andal	98,1	100	101,94%
13	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Persentase LPJ Berbasis yang andal dan tepat waktu	99	100	103,04%
14	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	94,19	100,21%
15	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepengurusan internal	83	96,43	116,16%

<p>II. Pencapaian Keuangan dan BMTs yang efisien, efektif, dan akuntabel</p>	<p>Nilai rata-rata hard competency pegawai</p>	<p>78</p>	<p>91,45</p>	<p>117,24%</p>
<p>TO Sistem informasi dan teknologi yang andal</p>	<p>Pemertasa kualitas pelaksanaan anggaran KIPP</p>	<p>85,5</p>	<p>87,88</p>	<p>102,33%</p>
<p></p>	<p>Nilai kualitas LK, tingkat LAKPS dan LAKPB</p>	<p>82</p>	<p>88</p>	<p>104,88%</p>
<p></p>	<p>Tingkat kualitas pelayanan BMT</p>	<p>100</p>	<p>110</p>	<p>110,00%</p>
<p></p>	<p>Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi</p>	<p>80</p>	<p>100</p>	<p>125,00%</p>

Jumlah Anggaran Program tahun 2021
 Jumlah Realisasi Anggaran Program tahun 2021

1.457.640.000
 1.440.895.989
 100,00%



MATRINS CASCAJONG

Três Frotas (R3): Regula EPPS S34.

ID	Estruturação				Implementação				Validação			
	Item (R1)	Item (R2)	Item (R3)	Item (R4)	Item (R1)	Item (R2)	Item (R3)	Item (R4)	Item (R1)	Item (R2)	Item (R3)	Item (R4)
1	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)
2	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)
3	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)
4	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)	Programa de controle de qualidade (R1)	Programa de controle de qualidade (R2)	Programa de controle de qualidade (R3)	Programa de controle de qualidade (R4)

Matriks Cascading

Fakultas Pendidikan IPS, Universitas BPPN Suka
Kendari-Tana

No	Kategori A				Kategori B				
	Isi yang dirubah	Tempo	Tempo belajar	Tempo tes	Isi yang dirubah	Tempo	Tempo belajar	Tempo tes	
1	Program belajar di kelas dengan menggunakan media yang ada di kelas dan di lingkungan masyarakat				Program belajar di kelas dengan menggunakan media yang ada di kelas dan di lingkungan masyarakat				
2	Program belajar di kelas dengan menggunakan media yang ada di kelas dan di lingkungan masyarakat				Program belajar di kelas dengan menggunakan media yang ada di kelas dan di lingkungan masyarakat				
3	Program belajar di kelas dengan menggunakan media yang ada di kelas dan di lingkungan masyarakat				Program belajar di kelas dengan menggunakan media yang ada di kelas dan di lingkungan masyarakat				

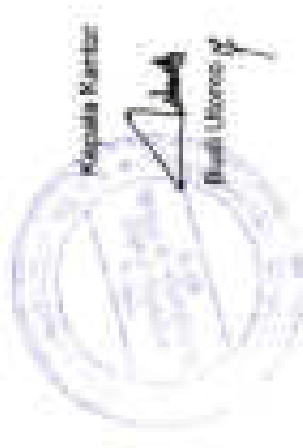





KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERENCANAAN MUDAHA SOLUSI

RANGKAIAN DAN MELAKUKAN BELAJAR

No	Kategori	Nama Substansi	Jumlah	Jenis Kegiatan										Total	
				Preparasi	Penyng	Revisi	Belajar Berbasis	Belajar Berbasis	Belajar Berbasis	Belajar Berbasis	Belajar Berbasis	Belajar Berbasis	Transfer		
1	Pembelajaran	Materi Pembelajaran	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	1.1.1.1.12
			1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13	1.1.1.14
			Total	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12
			Total	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12


 Kepala Kantor

 Kepala Kantor